

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Hasil Penelitian

##### 4.1.1 Gambaran Tentang Pustaka Arthashastra

Secara garis besar Arthashastra merupakan sebuah kompendium, sebuah risalah mengenai tata pemerintahan sebuah negara. Risalah yang sangat komprehensif ini membahas berbagai hal yang berkaitan dengan masalah serta fungsi-fungsi yang dibutuhkan pada administrasi dalam negeri sekaligus hubungan luar negeri sebuah negara. Kompendium ini memberikan pendidikan kepada penguasa negara tentang cara untuk mencapai tujuan nasional negara seperti perluasan pengaruh dari kerajaannya. Kompendium ini tidak hanya luas, namun juga terperinci. Bagaikan sebuah panduan praktis yang tak terlalu mengikat dan baku untuk dapat menghadapi kondisi lingkungan strategis yang selalu berubah-ubah dari sebuah negara.

Chanakya atau Kautilya sebagai penulis risalah ini merupakan seorang perdana menteri sekaligus penasihat politik utama Raja Chandragupta dan anaknya, Bindusara di Kerajaan Maurya. Naskah yang disusun sekitar 300 SM ini memuat doktrin kebijakan luar negeri yang berhubungan dengan keinginan raja ambisius untuk menjadi penakluk/penguasa dataran India.<sup>63</sup> Raja atau pemimpin negara berupaya mengakumulasi power negaranya untuk jadi yang terkuat. Dengan demikian negaranya akan aman dari serangan negara lain. Arthashastra disusun oleh Chanakya dengan latarbelakang sistem internasional yang anarki, tanpa adanya supremasi yang lebih tinggi dari negara. Keadaan ini diperparah dengan ketiadaan kesepakatan bersama mengenai penghormatan atas kedaulatan dan batas-batas suatu negara, selayaknya

---

<sup>63</sup> Satish Karad, "Perspective of Kautilya's Foreign Policy: An Ideal of State Affairs", *Modern Research Studies*. Volume 2. Nomor 2, June 2015. hlm. 322-332

yang berkembang pada masa modern saat ini. Pada masa dinasti Candragupta, sistem yang ada mengembangkan apa yang disebut sebagai pandangan realisme, yang mengedepankan *self-help*, upaya negara untuk terus mengakumulasi power agar *sustainability* negara tetap terjaga. Pandangan yang berkembang antar negara adalah pilihan hanya ada dua, antara menaklukkan atau ditaklukkan. Pengembangan power atau growth negara bisa terjadi ketika negara berhasil mengakuisisi wilayah kerajaan tetangganya atau kerajaan lainnya. Karena dengan akuisisi ini kerajaan mendapat tidak hanya penambahan wilayah, namun juga perbendaharaan yang diperoleh melalui upeti dari raja yang telah dikalahkan, dan juga sumber daya alam yang terdapat pada kerajaan yang telah ditaklukkan tersebut.

Vittal (2011:11) menyatakan, bahwa Arthashastra terbagi menjadi tiga bagian besar. Bagian pertama berhubungan dengan administrasi sebuah negara. Bagian ini menggambarkan organisasi yang terdapat pada negara, apa saja tugas tugas dan tanggung jawab dari setiap pejabat utama negara, baik itu dalam bentuk upaya menjaga ketertiban ataupun mengumpulkan pendapatan bagi negara. Bagian kedua berkaitan mengenai kode hukum dan keadilan. Bagian ini mencakup penjelasan mengenai hukum perdata dan hukum pidana serta upaya penegakkan hukum. Sementara itu, bagian ketiga berhubungan dengan kebijakan luar negeri yang tujuan utamanya adalah akuisisi wilayah melalui penaklukan. Ketiga bagian itu merujuk kepada tiga tujuan negara yaitu kekayaan/ kesejahteraan (ekonomi), keadilan (hukum dan ketertiban) dan pertumbuhan (perluasan wilayah/ kuasa). Negara yang stabil dan makmur hanya bisa aman jika memiliki administrasi yang adil dan efisien. Karena hal tersebut yang menetapkan kondisi yang tepat untuk akumulasi kekayaan dan perluasan wilayah.<sup>64</sup> Pada zaman tersebut perluasan wilayah

---

<sup>64</sup> Vinay Vittal, "Kautilya's Arthashastra: A Timeless Grand Strategy", *Tesis Magister*, (Alabama: School of Advanced Air and Space Studies Maxwell Airforce Base) 2011, hlm. 11

atau pertumbuhan dimaknai dengan menginvasi wilayah negara lain, namun jika dibawa ke keadaan politik internasional zaman sekarang, keadaan ini tentu tidak dapat dimaknai secara harfiah. Perluasan atau *growth* sebuah negara tidak dapat dimaknai semata pencaplokan sebuah negara secara fisik (melakukan invasi). Namun, lebih kepada perluasan kekuasaan negara terhadap negara lain di luar teritorinya, atau perluasan cakupan *power/* pengaruh dari negara yang bersangkutan tersebut.

Arthashastra disusun oleh Chanakya berdasarkan sejumlah buku politik Hindu kuno, tradisi politik, dan pengalaman hidupnya. Arthashastra karya Chanakya terdiri dari 32 bagian, 15 *adikarana* (buku) dengan 150 bab, 180 *Prakarana* (bagian yang ditujukan untuk topik tertentu) dan 6000 sloka. *Adhikarana* (buku) pertama membahas mengenai Raja, pelatihan yang harus dilewati oleh Raja, prosedur pengangkatan menteri serta pejabat negara, keamanan dan juga keselamatan negara. *Adhikarana* kedua menjabarkan mengenai tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh para pejabat eksekutif negara. Buku kedua ini juga menguraikan mengenai peran negara dalam kegiatan pertanian, pertambangan, dan rekreasi. Buku ketiga bicara mengenai hukum dan administrasi peradilan serta menyediakan sebuah kode-kode hukum. *Adhikarana* keempat membahas mengenai deteksi kejahatan beserta penindakannya serta kontrol negara atas para pedagang, pengrajin, penyiksaan dan hukuman. *Adhikarana* kelima merupakan kumpulan dari berbagai topik-topik berbeda mulai dari skala gaji pejabat negara, saran kepada perdana menteri mengenai kerberlangsungan tahta kerajaan. Sementara *adhikarana* keenam terbagi ke dalam dua bahasan besar yaitu mengenai unsur-unsur yang membangun sebuah negara dan bahasan satu lagi mengenai kebijakan luar negeri yang dapat dilakukan oleh negara. Pada *adhikarana* ketujuh Chanakya menjabarkan mengenai teori mandala, lingkaran negara (*Raj Mandala Theory/ the circle of state theory*) dan juga teori enam kebijakan luar negeri (*Ṣaḍguṇya/ Six fold Foreign Policy*) yang dapat digunakan dalam

berbagai situasi. Teori-teori ini digunakan untuk mencapai tujuan akhir yang telah ditetapkan, yakni memastikan kesejahteraan negara.<sup>65</sup>

*Adhikarana* kedelapan membahas mengenai *vyasanas* atau malapetaka/ ancaman/ kekurangan ataupun kelemahan yang dapat mempengaruhi fungsi unsur pembentuk negara secara negatif. *Adhikarana* kesembilan menjabarkan tentang persiapan menuju medan perang, mencakup jenis-jenis pasukan yang akan dimobilisasi pada sebuah ekspedisi, tindakan pencegahan yang harus diperhatikan dan bahaya-bahaya yang harus diwaspadai. Sementara itu *Adhikarana* kesepuluh menjelaskan mengenai cara memerangi musuh, jenis-jenis pertempuran, jenis kesatuan tempur, dan juga kamp pertempuran utama. *Adhikarana* kesebelas membahas mengenai bagaimana cara *Vijigīṣu* (pemimpin negara yang memiliki hasrat sebagai penakluk) harus mampu menundukkan *samghas* atau oligarki yang diatur oleh sekelompok pemimpin. Pada *adhikarana* keduabelas Chanakya menunjukkan bagaimana seharusnya raja yang lemah itu bersikap ketika diancam oleh raja yang lebih kuat. Sedangkan *adhikarana* ketigabelas membahas mengenai tata cara menaklukkan ibu kota negara musuh yang dibentengi baik dengan mengandalkan akal/ dalih/ negosiasi (diplomasi) ataupun dengan cara bertempur (berperang). Bagian ini juga membahas mengenai bagaimana cara memerintah wilayah yang telah ditaklukkan. Sementara itu, pada *adhikarana* keempatbelas, Chanakya membahas mengenai cara-cara rahasia yang dapat digunakan untuk menghancurkan pasukan musuh, mulai dari obat-obatan hingga cara-cara gaib. Kemudian pada *adhikarana* kelimabelas Chanakya membeberkan penjelasan mengenai 32 jenis *tantrayukti* atau metode untuk memperlakukan subjek, alat-alat yang dipakai dalam olah-ilmu.<sup>66</sup> Dalam Arthashastra, Chanakya menguraikan

<sup>65</sup> Rangarajan, *op. cit.* hlm. 10

<sup>66</sup> Made Astana, dan C.S. Anomdiputro, *Kautilya (Cāṇakya) Arthaśāstra: Masalah Politik, Ekonomi, Hukum, Budaya dsbg., Buku Pegangan Para Pemimpin Negara*, (Surabaya: Paramita, 2015). hlm 677-83

dengan dengan cukup detail mengenai cara dan metode untuk membangun sebuah negara dan melestarikan kekuatannya dalam lingkungan yang kompetitif secara strategis dan dalam kekuasaan adversarial dengan bahaya *inheren* dari subversi politik serta ketidakstabilan sosial.<sup>67</sup>

#### 4.1.2 Pemetaan Ancaman dalam Pandangan Chanakya Arthashastra

Chanakya berasumsi bahwa negaranya saat itu hidup dalam dunia hubungan luar negeri yang hanya memiliki dua pilihan antara menaklukkan atau ditaklukkan. Maka dari itu, sebagai seorang dengan pemikiran yang begitu realis, ia tak lagi mengatakan “bersiaplah untuk berperang, namun tetaplah berharap untuk sebuah perdamaian” ia dengan “cukup radikal” menyatakan “bersiaplah untuk berperang dan berencanalah untuk menaklukkan.” Raja harus dapat memetakan ancaman-ancaman potensial yang mungkin dapat menyulitkan negaranya.

Secara garis besar, Chanakya membahas mengenai ancaman pada *adhikarana* kedelapan. Chanakya merujuk bencana atau ancaman dengan terminologi *vyasana*. Bencana atau ancaman ini sumbernya bisa dari dalam negeri ataupun luar negeri. Ancaman dari dalam negeri termasuk di dalamnya adalah pemberontakan, kelaparan, wabah penyakit, epidemi, perselisihan internal, dekadensi penguasa, pedagang/ pejabat yang tidak jujur (korup), masalah perekonomian, penghianatan yang dilakukan oleh petinggi negara (menteri/ pejabat tinggi negara), paceklik/ kekeringan, kelaparan, bencana alam (banjir, kebakaran hutan), dan kejahatan domestik (perampokan, pencurian). Sedangkan bencana dari luar negara dapat berupa upaya musuh untuk menaklukkan/ menginvasi sang *vijigīṣu* / negara, sekutu yang membelot, dan infiltrasi agen dari negara asing ke dalam negeri.<sup>68</sup>

<sup>67</sup> Shounak Set, “Ancient wisdom for the Modern World: Revisiting Kautilya and His Arthashastra in the Third Millenium”, *Journal of Strategic Analysis*, Volume 39, Number 6, 2015, hlm.710-714.

<sup>68</sup> Astana *op.cit.* hlm.483-531

Chanakya menyatakan ancaman baik dari dalam negeri ataupun dari luar negeri sama-sama harus ditangani secara baik. Raja atau penguasa bertugas untuk melindungi rakyatnya. Dalam Arthashastra karya Chanakya, kebahagiaan dan kesejahteraan rakyat merupakan hal mendasar dan utama yang harus terus berupaya diwujudkan dan dijaga oleh Raja/ penguasa. Sebagaimana dijelaskan pada bagian pembuka Arthashastra:

*In the happiness of his subjects lie the king's happiness; in their welfare his welfare. he shall not consider as good only that which pleases him but treat as beneficial to him whatever pleases his subjects. (Arthashastra 1.19.34)*

Hal ini juga di tegaskan oleh beberapa narasumber<sup>69</sup> bahwa tugas raja/ penguasa tidak hanya untuk mencari kesenangan pribadinya, namun juga bagaimana mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan rakyatnya. Bila penguasa sejahtera namun rakyatnya tidak, maka sesungguhnya penguasa tersebut telah gagal untuk mewujudkan salah satu tujuan negara, yaitu kesejahteraan rakyat. Pemimpin negara harus berusaha mencegah gangguan timbul, mengatasi ancaman yang sudah muncul, serta menghancurkan dan menghentikan bahaya yang mengancam keselamatan dan kesejahteraan negara. Baik perekonomian dan keamanan negara merupakan hal yang saling melengkapi dan penting bagi negara. Keadaan ini juga tersurat dalam Arthashastra 8.4.50 serta pada 8.5.21:

*In the interest of the Prosperity of the country, a king should be diligent in foreseeing the possibility of calamities, try to avert them before they arise, overcome those which happen, remove all obstructions to economic activity and prevent loss of revenue to the state. (Arthashastra 8.4.50, 8.5.21)*

Kutipan di atas menunjukkan, bahwa dalam upaya mewujudkan kesejahteraan negara penguasa perlu memetakan kemungkinan malapetaka yang terjadi, mencoba mencegah hal tersebut sebelum terjadi, dan menanganinya ketika malapetaka tersebut terjadi. Upaya menjaga perekonomian negara tidak hanya melibatkan sisi ekonomi namun juga sisi keamanan dan pertahanan negara yang dibantu oleh militer. Pemimpin

---

<sup>69</sup> Wawancara Prof. Dr. I Made Titib (2 Oktober 2018) dan Dr. I Gede Suwantana

negara harus mampu mengelola dan memegang kekuasaan penuh atas perbendaharaan atau perekonomian serta pengelolaan angkatan bersenjata atau militernya. Chanakya menyatakan dengan jelas, bahwa baik militer maupun ekonomi memiliki signifikansi yang sama-sama penting dalam menanggulangi ancaman keamanan dan pertahanan negara. Militer dibutuhkan untuk menjaga negara dari serangan musuh dan menjaga kekayaan yang telah dimiliki oleh negara, namun militer juga membutuhkan sokongan ekonomi untuk menjalankan tugas dan fungsinya.<sup>70</sup>

Dalam pandangan Chanakya, ancaman secara eksternal yang paling potensial adalah dari negara yang berbatasan langsung dengan negaranya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa negara tetangga merupakan musuh paling potensial di mana ancaman eksternal terhadap negara paling tinggi berasal dari negara tetangga ini. Pemetaan ancaman utamanya ancaman dari luar negara dijabarkan dalam teori Mandala. Posisi geografis dari sebuah negara yang berdekatan/berbatasan langsung dikategorikan sebagai musuh alami dan paling potensial. Kemudian setiap negara yang beraliansi dengan negara tetangga tersebut juga akan dikategorikan sebagai musuh.<sup>71</sup> Di lain pihak, musuh dari negara tetangga tersebut selayaknya diajak bekerjasama karena dikategorikan sebagai kawan. Bahasa mudahnya adalah “musuh dari musuhmu adalah teman, dan teman dari musuhmu adalah musuh.”

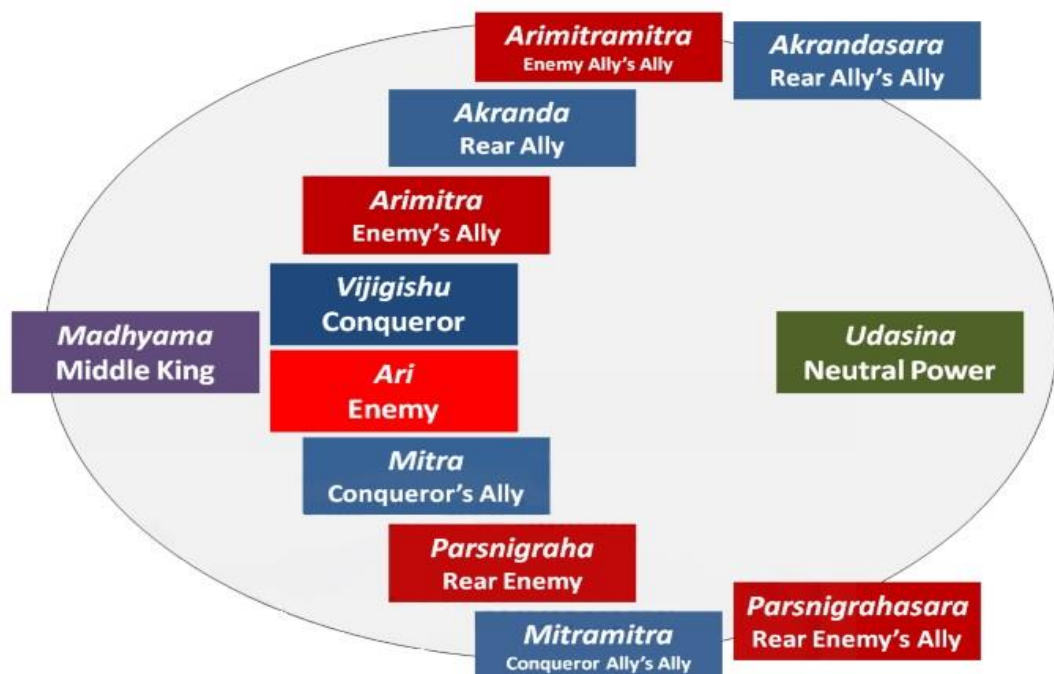
*Mandala Theory – The Circle of State Theory*, menjabarkan konstelasi geopolitik dari sebuah negara<sup>72</sup>. Teori Mandala ini menyertakan setidaknya 12 kategori negara dalam lingkaran negara/ *circle of a state*. Pertama, *vijigīṣu* (*the would be conqueror*) atau negara yang berhasrat untuk menaklukkan negara lain. Kedua, *ari* (*enemy*) musuh utama negara

<sup>70</sup> R Shamasastri, *Kautilya's Arthashastra*, 2013, Hlm. 447-8 dalam [https://archive.org/details/Arthashastra\\_English\\_Translation/page/n1](https://archive.org/details/Arthashastra_English_Translation/page/n1) diakses pada 20 September 2018

<sup>71</sup> RP Kangle, *The Arthashastra Part II* (Delhi: Motilal Banaridass, 1992), hlm 318. Adhikarana 6. Bab 2. Sutra 13

<sup>72</sup> Merujuk kepada *Vijigīṣu*/ raja/ negara penakluk, yang diposisikan berada ditengah negara-negara lain dalam konstelasi percaturan politik internasional dunia yang berupaya saling menaklukkan/ mempengaruhi satu sama lain.

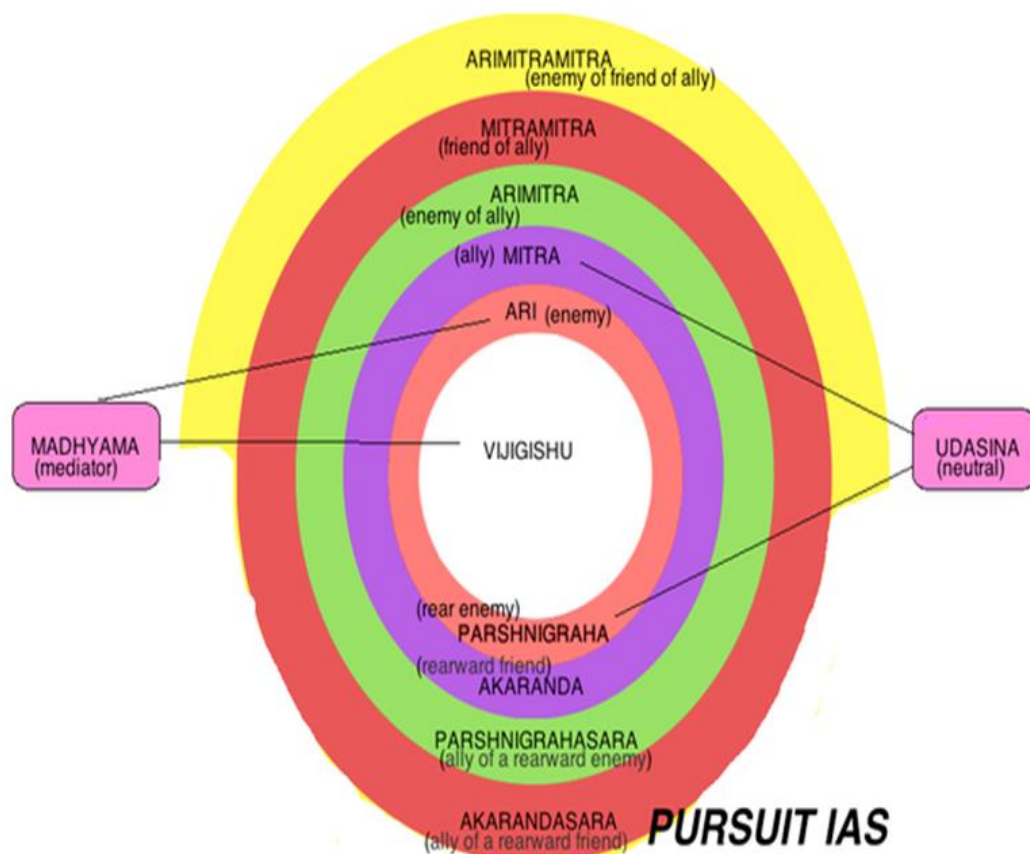
penakluk. Ketiga, *mitra* (*the vijigīṣu's ally*) sekutu dari sang vijigīṣu. Keempat, *arimitra* (*ally of enemy*) sekutu dari musuh. Kelima, *mitramitra* (*friend of ally*) kawan dari sekutu sang vijigīṣu. Keenam, *arimitramitra* (*ally of enemy's friend*) kawan dari sekutu sang musuh. Ketujuh, *paršnigraha* (*enemy in the rear of the vijigīṣu*) musuh di garis belakang sang vijigīṣu. Kedelapan, *akranda* (*vijigīṣu's ally in the rear*) sekutu dari sang vijigīṣu di garis belakang. Kesembilan, *paršnigrahasara* (*ally of paršnigraha*) sekutu dari musuh di garis belakang sang vijigīṣu. Kesepuluh, *akrandasara* (*ally of akranda*) sekutu dari akranda. Kesebelas, *madhyama* (*middle king bordering both vijigīṣu and the ari*) negara tengah yang berbatasan dengan vijigīṣu serta *aria tau* musuh. Sementara itu yang keduabelas, *udasina* (*lying outside, indifferent/ neutral, more powerful than vijigīṣu, ari and madhyami*) negara netral/ acuh tak acuh, berada diluar dari lingkaran, biasanya lebih kuat dari vijigīṣu, ari, dan juga *madhyami*.<sup>73</sup> Gambaran konstelasi geopolitik dalam *mandala theory* dapat dilihat dari ilustrasi pada Gambar 4.1.



Gambar 4.1 Konstelasi Geopolitik dalam teori mandala  
sumber: Vittal, 2011

<sup>73</sup> R.P. Kangle, 1986 *op. cit.* hlm. 248

Namun hal yang perlu digaris-bawahi adalah dalam konstelasi geopolitik ini tidak serta merta kemudian secara harfiah menyatakan bahwa sang *vijigīṣu* atau negara yang berniat untuk menaklukkan menjadi pusat dari negara-negara lainnya. Ilustrasi di atas merupakan bentuk simbolis semata, di mana dalam keadaan nyata sangat memungkinkan terbentuknya mandala yang saling tumpang tindih, tergantung pada konstelasi arah kerjasama ataupun analisa lingkungan strategis dalam percaturan politik regional maupun global. Konstelasi geografis ini bersifat dinamis, di mana negara tetangga bisa saja bermusuhan, ramah atau bersifat hubungan vasal (negara bawahan)<sup>74</sup>.



Gambar 4.2 Ilustrasi Teori Mandala  
sumber: <https://www.pursuitias.org>, 2018

<sup>74</sup> Kangle, 1986, *Op. cit.* hlm 249

Hal ini ditegaskan oleh R.P Kangle (1986), bahwa Chanakya sesungguhnya tidak memukul rata seluruh negara yang menjadi tetangga adalah musuh. Hal ini dibahas pada *adhikarana* ketujuh, bab 18 sutra ke-29, bahwa:

Para pangeran negara tetangga, *samantas*, biasanya dianggap bermusuhan. Tetapi ada kemungkinan bahwa beberapa dari mereka mungkin memiliki perasaan ramah terhadap *vijigīṣu* (negara yang berhasrat menaklukkan), sementara yang lain mungkin bahkan tunduk padanya. Negara-negara tetangga terbagi ke dalam tiga kategori; *aribhavin* (dari disposisi bermusuhan), *mitrabhavin* (dari disposisi ramah) dan *bhrytyabhavin* (dari disposisi persaudaraan).<sup>75</sup>

Dilihat dari penyampaian tersebut maka sesungguhnya sebuah negara perlu memetakan cara yang akan dipakai untuk menghadapi negara-negara tetangganya.

Hal tersebut dibenarkan oleh para narasumber<sup>76</sup> bahwa kategorisasi negara ini berdasarkan kepada beberapa hal seperti: tindakan/perilaku yang ditunjukkan para negara tetangga terhadap *vijigīṣu*, kesamaan tujuan yang ingin dicapai, perbedaan kepentingan, muatan politis aliansi negara tetangga tersebut dengan negara lainnya dan lain sebagainya. Lebih Jauh, dalam pandangan Chanakya negara tetangga secara alami dipandang sebagai musuh potensial, namun tidak serta merta semua negara tetangga adalah musuh. Jika negara tetangga selalu menunjukkan sikap dan kebijakan-kebijakan yang berseberangan dan merugikan sang *vijigīṣu* bahkan berpotensi mengancam, maka negara tetangga tersebut dikategorikan sebagai *aribhavin*. Sementara, jika negara tetangga tersebut bersikap kooperatif dengan sang *vijigīṣu*, melakukan banyak kerjasama yang saling menguntungkan satu sama lain, memiliki visi bersama akan keamanan dan perdamaian kawasan, maka negara tetangga tersebut bukanlah musuh, melainkan sebagai *mitrabhavin*.

<sup>75</sup> R.P. Kangle. 1986. *Op. cit.* hlm. 250

<sup>76</sup> Wawancara Prof. Dr. I Made Titib (wawancara 2 Oktober 2018) dan Dr. Yoga Segara (4 Oktober 2018)

Jika ditelaah lebih jauh terlihat bahwa teori mandala merupakan salah satu dasar dalam menjalankan kebijakan luar negeri yang dijalankan pada masa dinasti Maurya di bawah supervisi dari *Acharya* Chanakya. *Mandala theory* yang diungkapkan oleh Chanakya, sebagaimana dijelaskan dalam penjabaran di atas merupakan konstelasi geopolitik dari negara-negara yang berdampingan dengan negara *vijigīṣu*. Teori ini menyatakan bahwa ancaman potensial muncul dari negara yang berbatasan langsung atau negara bertetangga. Dalam menjalankan kebijakan luar negerinya, Chanakya selalu mengingatkan pemerintahan dinasti Maurya untuk berpedoman terhadap teori ini dalam menentukan posisi negara yang akan diajak bekerjasama ataupun akan ditaklukkan.

Dengan demikian, menurut beberapa narasumber<sup>77</sup>, *Acharya* Chanakya selalu menekankan bahwa dalam menjalankan diplomasi, raja/pemimpin negara selayaknya selalu berpedoman pada beberapa hal. Terutama adalah teori mandala, mengenai konstelasi geopolitik negara yang akan diajak bekerjasama atau akan ditaklukkan. Pasca menentukan posisi dari negara yang ditargetkan tersebut, langkah selanjutnya adalah kebijakan apa yang akan diambil untuk menghadapi negara tersebut yakni *śāḍgunya* atau *six fold foreign policy*. Berikutnya, baru diputuskan upaya apa yang akan ditempuh sebagai bagian integral dari kebijakan luar negeri tersebut (*catur upaya*), apakah *sama*, *dama*, *bedha* dan atau *danda*. Tetapi, yang perlu ditekankan adalah sifat dari kebijakan dan arahan dari Chanakya ini tidak bersifat kaku dan harus sama dengan yang tertulis. Justru kalau dipandang dan diaplikasikan demikian, filsafat politik dari Chanakya ini akan mudah usang dan termakan zaman. Maka dari itu, fleksibilitas dan dinamisme-nya harus tetap dijalankan sesuai dengan perkembangan zaman dan perubahan konstelasi perpolitikan internasional yang terjadi.

Bagi Chanakya dalam membuat sebuah strategi termasuk strategi diplomasi pertahanan pengetahuan mengenai pemetaan ancaman adalah

---

<sup>77</sup> Wawancara Dr. Yoga Segara (4/11/2018), I Ketut Donder Ph.D dan Dr. (cand.) Ni Kadek Surpi Aryadharna

hal yang sangat penting. Raja/ pemimpin negara harus mampu memetakan ancaman yang dapat terjadi kedepannya melalui pola-pola tindakan ataupun isu yang berkembang baik dalam skala regional maupun global. Di sinilah peranan dari *secret agent* atau intelijen negara bertindak. Intelijen negara sebagai perpanjangan mata dan telinga raja harus mampu mencari informasi-informasi yang penting bagi raja.

Pada zaman dahulu, sistem telik-sandi digunakan oleh para intelijen kerajaan sehingga persebaran informasi penting bisa sampai ke telinga raja dengan lebih cepat namun tetap terjaga kerahasiaannya. Mandala-mandala yang diciptakan oleh negara itu sesungguhnya juga menjadi sasaran dasar kerja intelijen pada masa itu. Pada negara sahabat (*mitra*) intelijen berfungsi untuk memperoleh informasi yang sekiranya dapat mendeteksi apakah ada kemungkinan mitra ini membelot menjadi musuh. Sementara pada negara musuh (*ari*) intelijen ini tidak hanya untuk mencari kelemahan lawan, tak jarang pula Chanakya menyarankan operasi intelijen di negara musuh yang bertujuan untuk mengacaukan dan melemahkan sang musuh agar lebih mudah ditaklukkan saat diserang nantinya.<sup>78</sup>

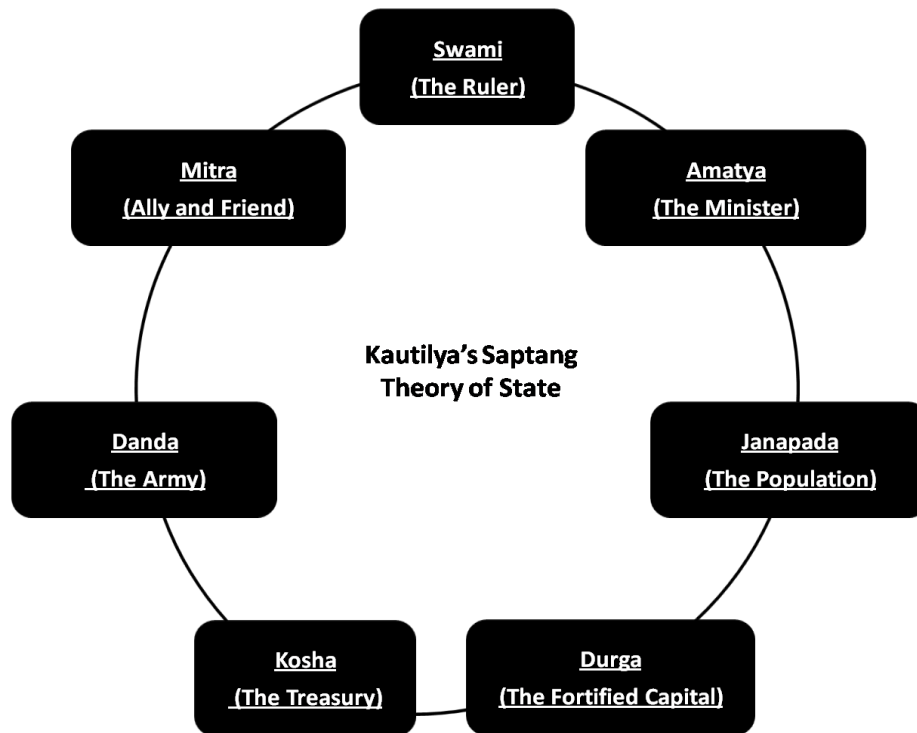
#### 4.1.3 Konsep Tata Pemerintahan (*Statecraft*) dalam Arthashastra

*Saptanga Theory* menggambarkan mengenai tujuh elemen yang membentuk sebuah negara. Negara dalam Arthashastra dianalogikan sebagai organisme yang berkembang dan *prakritis* adalah bagian tubuhnya<sup>79</sup>. Tujuh bagian ini antara lain: *Swamin* (*Ruler*, Raja/ Penguasa/ Pemimpin negara); *Amatya* (*concilors/* anggota dewan/ mereka yang mewakili institusi negara); *Janapada* (*Territory/ resources/* sumber daya negara, termasuk wilayah dan penduduk); *Durg* (*Well-fortified Sovereign entity/* entitas berdaulat yang dibentengi); *Kosa* (*Treasury/* Perbendaharaan); *Danda/ Bala* (*Military/ Army and order keeping/* Militer

<sup>78</sup> Wawancara Dr. I Gde Suwantana, Dr. (Cand.) Ni Kadek Surpi Aryadharma dan I Ketut Donder Ph.D

<sup>79</sup> Sukra, *Sukraniti*, (Mumbai: Khemraj Shrikrishnadass, 2012) chapter 1, sutra 62

dan penjagaan ketertiban); dan *Mitra* (*Friend/ Ally/ teman dan sekutu negara*).<sup>80</sup> Ilustrasi dari saptanga ini dapat dilihat pada Gambar 4.3 tentang ilustrasi *saptanga* Teori.

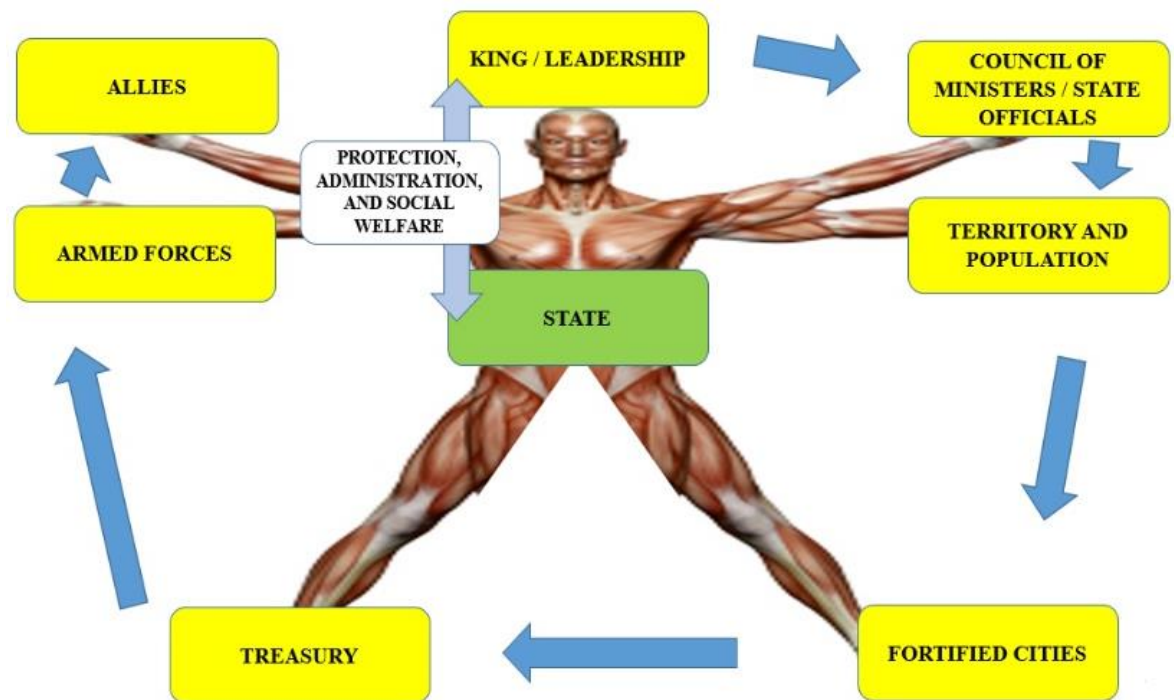


Gambar 4.3 Ilustrasi Saptanga Teori  
Sumber: <http://www.defencestudies.co>, 2017

Ketujuh elemen ini saling terhubung. Hirarki derajat kepentingan setiap elemen secara berurut dimulai dari *Swami* atau pemimpin negara; *Amatya* atau pejabat legislatif negara; *Janapada* atau populasi dan wilayah; *Durga* atau kota yang dibentengi; *Kosha* atau perbendaharaan negara; *Danda* atau angkatan bersenjata, kapabilitas militer negara, dan yang terakhir adalah *Mitra* atau sekutu. Secara garis besar derajat kepentingan merujuk pada skala prioritas ketika terjadi ancaman terhadap elemen-elemen negara ini. Sehingga ketika terjadi ancaman terhadap Pemimpin negara (*swami*) dan juga Pejabat legislative negara (*Amatya*) maka perlindungan terhadap Pemimpin negara menjad jauh lebih penting daripada perlindungan terhadap Pejabat Legislatif negara. bentuk hirarki ini dapat

<sup>80</sup> Kautilya Arthashastra 6.1.1

dilihat pada Gambar 4.4 mengenai Saptanga (Tujuh elemen yang membentuk negara)



Gambar 4.4 Saptanga ( Tujuh Elemen yang membentuk Negara)

Sumber: Kumar, 2003

Namun yang perlu di tekankan adalah Chanakya sendiri tidak menganjurkan negaranya untuk mengikuti hirarki ini secara membabi-butu. Analisis dan berbagai pertimbangan tetap menjadi dasar dalam menentukan derajat kepentingan. Ancaman terhadap salah satu elemen atau lebih tetap harus disikapi dengan hati-hati, penuh kewaspadaan sehingga tidak menggagu stabilitas dan sustainabilitas negara.

Bagian Pertama dari *Saptanga* adalah *Swami/ Ruler/ King/* Pemimpin Negara. Bagian ini menempati posisi paling penting. Bagi Chanakya kekuatan dan kesejahteraan negara itu bergantung paling banyak dari kualitas pemimpinnya. Bagi Chanakya pemimpin negara merupakan sumber perkembangan sosial dan kesejahteraan sebuah negara.

Hal ini ditegaskan oleh beberapa narasumber<sup>81</sup> bahwa dalam konsep Hindu, termasuk juga dalam Arthashastra karya *Acharya Chanakya*, raja atau pemimpin negara itu sangat krusial posisinya. Kualitas seorang raja atau pemimpin menentukan kesejahteraan dan keberlangsungan negara itu sendiri. Pemimpin harus memiliki kualitas yang baik sebagaimana disebutkan dalam sastra-sastra Hindu yaitu *Astabrata*. Di mana pemimpin memiliki kualitas-kualitas delapan dewata.<sup>82</sup>

Kualitas *astabrata* ini juga diharapkan dalam pola kepemimpinan Jawa sebagaimana dibahas oleh Soemarsaid Moertono.<sup>83</sup> Raja-raja Jawa pada abad XVI-XIX dituntut untuk menjadi raja yang adil, bijaksana dan memiliki kualitas kepemimpinan yang disebut sebagai *astabrata*. Pemimpin juga harus mampu memberikan contoh yang baik kepada rakyatnya. Raja atau pemimpin negara harus memiliki ketegasan dan merupakan pribadi yang *visioner*. Mampu memetakan ancaman yang kira-kira dapat mengancam keberlangsungan negara kedepannya dan mampu merancang strategi yang tepat untuk menghalau ancaman tersebut agar tidak terjadi dan merusak negara di kemudian hari. Pemimpin negara harus memiliki kecerdasan emosional, ketegasan, kecakapan, kesigapan dan cekatan dalam pengambilan keputusan. Pemimpin harus mampu mempelajari kesejarahan, dalam arti mampu belajar dari masa lalu mengenai pola-pola

<sup>81</sup> Wawancara Dr. I Ketut Donder (15 November 2018), Prof. Dr. I Made Titib (2 oktober 2018) dan Dr. I Gede Suwantana

<sup>82</sup> *Asta brata*: konsep kepemimpinan yang mengambil contoh pedoman dari delapan sifat dewata: (1) *Indrabrata*: pemimpin seperti Dewa Indra, memberi kesejahteraan, (2) *Yama Brata*: pemimpin seperti Dewa Yama: mampu menegakkan hukum secara tegas tanpa pandang bulu. (3) *Surya Brata*: Pemimpin seperti Dewa Surya/Matahari: memberikan sinar secara adil dan merata pada seluruh rakyat. (4) *Candra Brata*: Pemimpin seperti Dewa Candra/ Bulan: memperlihatkan wajah tenang berseri-seri, memenangkan. (5) *Bayu Brata*: Pemimpin seperti Dewa Bayu/ Angin: punya kemampuan menyelidiki hingga ke celah-celah tersembunyi. (6) *Kuvera Brata*: Pemimpin seperti Dewa Kuvera: Bijaksana menggunakan dana/ keuangan dan selalu berhasrat mensejahterakan rakyat. (7) *Baruna Brata*: Pemimpin Seperti Dewa Baruna: mampu memberantas segala bentuk penyakit yang berkembang di masyarakat. (8) *Agni Brata*: Pemimpin seperti Dewa Agni: seallau mampu memotivasi tumbuhnya semangat dan sifat ksatria

<sup>83</sup> Soemarsaid Moertono, *Negara dan Kekuasaan di Jawa Abad XVI-XIX*. (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2018), hlm. 49-58

ancaman yang bisa terjadi, pola-pola/pattern yang terdapat dalam analisa konstelasi politik global, sehingga negara akan tetap eksis dan semakin kuat kedepannya.

Bagian kedua dari tujuh elemen yang membentuk negara adalah *Amatya* atau *Minister* (Menteri). Chanakya menyatakan bahwa tidaklah mungkin bagi seorang raja untuk memerintah secara efisien dan berhasil jika berjalan sendiri. Sama halnya seperti kereta tidak mungkin berjalan hanya dengan satu roda saja. Jumlah menteri ini tidak diberi patokan khusus, pengangkatannya disesuaikan dengan kebutuhan negara saat itu. Menteri menurut Chanakya harus memiliki kualitas berikut ini, seperti: penduduk asli negara tersebut, *visioner*, bijaksana, memiliki ingatan yang baik, lahir dari keluarga besar, berpengaruh, terlatih dalam seni, waspada, fasih, berani, cerdas dan memiliki antusiasme, kekuatan, serta ketekunan.<sup>84</sup>

*Janapada* merupakan bagian ketiga dari tujuh elemen yang membentuk negara. *Janapada* merujuk pada pengertian dua elemen sekaligus yakni wilayah dan juga populasi. Namun Dr. Gde Suwantana dalam wawancara pada 15 November 2018 menegaskan bahwa ada hal yang perlu dicermati pada bagian ini. Jika kita melihat konteks kerajaan zaman dahulu yang masih bersifat *land-base* maka luas wilayah/ teritori dari sebuah negara akan menentukan seberapa kaya-nya negara tersebut. Semakin luas wilayah teritorinya maka semakin berkuasalah negara tersebut. Dengan demikian, bentuk perluasan kekuasaan pada masa itu merujuk kepada invasi atau pencaplokan wilayah negara lain untuk memperluas teritori sekaligus mengambil alih seluruh sumber daya yang terdapat dalam teritori wilayah negara yang diakuisisi tersebut. Namun semenjak perjanjian Westphalia, di mana kedaulatan negara dijamin dan tidak ada satupun negara yang boleh melakukan invasi terhadap negara lainnya, maka terjadi pergeseran yang sangat berarti dalam konteks

---

<sup>84</sup> Mohinder Kaur, "Political and Administrative Ideas of Manu and Kautilya: A Comparative Study", *Doctoral Dissertation*. (Patiala: Department of Political Science, Punjabi University, 2011) hlm. 72-85

kekuasaan ini. Kekuasaan tidak lagi secara harfiah dengan cara menduduki wilayah negara lain, namun lebih kepada penguasaan simbolis terhadap tiga hal mendasar yaitu penguasaan terhadap ekonomi (termasuk sumber daya alam), Teknologi (termasuk *cyber*), dan juga penguasaan terhadap ilmu pengetahuan.<sup>85</sup>

*Durga (Fortified Cities)* adalah kota yang dibentengi menjadi bagian keempat dalam tujuh elemen penting pembentuk negara. Untuk dapat mengerti mengapa benteng ini penting kita harus mampu melihat situasi keadaan kerajaan Maurya saat itu. Situasi geografis di India utara dan sifat pertempuran di zaman kuno membuat ibu kota yang dibentengi itu menjadi dianggap sangat penting bagi keamanan dan keselamatan kerajaan.<sup>86</sup>

Bagian kelima adalah *Kosa (treasury)* perbendaharaan atau perekonomian negara. Sumber utama pendapatan suatu negara pada zaman dahulu adalah perpajakan masih sama seperti saat ini. Chanakya telah mengembangkan prinsip-prinsip tertentu untuk membimbing raja dalam kebijakan perpajakannya. Pengambilan pajak dari rakyat ini tidak boleh terlalu ringan ataupun terlalu berat. Sebagaimana lebah yang mengambil madu dari bunga tanpa merusaknya, maka demikian pula raja/pemimpin negara harus bisa mengambil pajak dari rakyatnya tanpa membahayakan ataupun terlalu membebani mereka.<sup>87</sup>

*Bala (Army)* atau tentara/angkatan bersenjata merupakan bagian keenam dari tujuh elemen pembentuk negara. Chanakya bahkan menjelaskan cukup terperinci mengenai bagian ini. Bagaimana tentara yang baik, pasukan yang berkualitas dibentuk oleh para *Kshatriya*, namun tidak menutup kemungkinan *varna* lainnya seperti *waisya* dan *sudra* juga diperbantukan dalam tentara jika dibutuhkan.<sup>88</sup>

---

<sup>85</sup> Wawancara Dr. I Gede Suwantana, 16 November 2018

<sup>86</sup> Wawancara Dr. I Ketut Donder, Ph.D, 15 November 2018.

<sup>87</sup> Kaur, *Op.cit.* hlm. 38-9

<sup>88</sup> Kaur, *op.cit.* hlm. 40

Bagian terakhir dari tujuh elemen pembentuk negara adalah *Mitra* (*ally*) adalah sekutu atau pihak yang diajak bekerjasama. Keberadaan *Mitra* atau sekutu, pihak yang diajak bekerjasama atau membentuk aliansi sebagai bagian dari elemen pembentuk negara tentu menjadi hal yang terlihat sedikit berbeda dari konsep barat. Bagi umat Hindu pada zaman dahulu negara merupakan entitas konkret yang berdiri dalam hubungan yang memiliki derajat kedekatan tertentu dengan entitas lain yang memiliki sifat yang sama. Hubungan kerjasama atau aliansi. Mitra ini sangatlah statis dan begitu dinamis.

Chanakya menggambarkan ketujuh elemen pembentuk negara itu sebagai eksposisi dari teori Mandala (*circle of state*) yang kemudian membentuk dasar dari kebijakan luar negeri di lingkungan yang didominasi oleh ekspansionisme teritori atau penaklukan teritori. Maka dari itu, sebelum melanjutkan sebuah ekspedisi untuk menaklukkan wilayah lain, raja atau pemimpin negara harus menggunakan langkah-langkah preventif dan defensif untuk menghalau bahaya/ ancaman yang mungkin melemahkan salah satu unsur penyusun negaranya sendiri. Menurut Chanakya, raja harus selalu berusaha dengan sangat gigih untuk melakukan tugas dan tanggung-jawabnya terhadap rakyat negaranya. Tugas dan tanggung jawab tersebut meliputi memberikan perlindungan, melayani administrasi dan menjamin kesejahteraan rakyatnya.

Ketujuh elemen ini kemudian secara tidak langsung juga menjadi pedoman ukuran mengenai kekuatan nasional yang komprehensif dari sebuah negara. Kualitas raja atau pemimpin menentukan apakah negara tersebut akan bisa memiliki power yang baik atau tidak. Maka dari itu, Chanakya menetapkan serangkaian prasyarat yang tinggi, berupa kualitas-kualitas yang harus dimiliki oleh seorang raja sebagai pemimpin negara, sehingga dapat menjalankan tugasnya dengan efektif dan efisien. Raja yang ideal menurut Chanakya merupakan perwujudan dari kualitas kepemimpinan yang mumpuni, energi intelektual yang besar, serta karakter

pribadi yang adi luhur. Raja sebagai pimpinan negara juga harus aktif dalam manajemen perekonomian negara.

Chanakya menyatakan bahwa semua kegiatan negara itu bergantung pada perbendaharaan atau perekonomian negara. Tak dapat dipungkiri bahwa dari kekayaan ini pula kekuatan pemerintah bisa muncul. Perbendaharaan ini pula yang kemudian mendanai angkatan bersenjata untuk kemudian dapat bertugas melindungi negara sekaligus juga dimanfaatkan untuk memperoleh wilayah atau teritori baru melalui ekspedisi penaklukan. Maka dari itu kemudian Chanakya menyarankan agar pemimpin negara atau raja memastikan kontrol aktif terhadap perbendaharaan dan militer ini.

Chanakya juga menegaskan bahwa administrasi pemerintahan yang efisien merupakan prasyarat bagi perekonomian negara yang sedang berkembang. Maka dari itu, Chanakya kemudian menyarankan seorang raja selayaknya memastikan pemerintahannya berjalan dengan administrasi yang efektif, hukum dan ketertibannya terjaga. Dengan hukum dan ketertiban yang terjaga ini muncul stabilitas keamanan dan juga perekonomian. Singkat kata ketujuh elemen ini harus dijaga sedemikian rupa agar tidak melemah, agar tercipta keamanan, kesejahteraan dan juga prestise negara yang baik di mata internasional.

Konsep *Saptanga* teori ini tidak hanya dipandang sebagai tujuh elemen yang harus dimiliki negara yang menginginkan kekuatan yang mumpuni bagi bangsanya. Dalam interpretasi yang lain Konsep *Saptanga* juga dimaknai sebagai *Elements of Sovereignty*.<sup>89</sup> Di mana sebuah negara selayaknya menjaga ketujuh elemen ini dari ancaman yang bisa melemahkan salah satunya. Karena pelemahan salah satu elemen dalam *saptanga* ini dapat memicu kelemahan pada elemen-elemen lainnya. Dengan demikian, untuk mencapai kekuatan nasional yang komprehensif

---

<sup>89</sup> Col. Harjeet Singh, *The Military Strategy of The Arthashastra*, (New Delhi: Pentagon Press, 2012) hlm 32

negara selayaknya mampu menjaga dan bahkan memperkuat kualitas ketujuh elemen saptanga ini.

Tujuh *prakritis* bersama-sama termanifestasi menjadi Shakti atau kekuatan bagi negara. Arthashastra mengidentifikasi tiga *shakti*: *Prabhava-shakti*, *Mantra-shakti* dan *Utsaha-shakti*. *Prabhava-shakti* dimaknai sebagai kekuatan untuk menghasilkan "efek" yang menguntungkan negara yang berkaitan dengan ekonomi dan juga kekuatan militer suatu negara. Dengan demikian, dalam pendekatan ilmu Hubungan Internasional saat ini, dapat diasosiasikan dengan konsep *hard power*. *Mantra-shakti* dimaknai sebagai kekuatan untuk mempengaruhi, memberi nasihat, dan mendorong negara lain untuk dikooptasi oleh sang *vijigīṣu*.

Dalam ilmu Hubungan Internasional, konsep ini sering diidentikkan dengan *soft power* berupa diplomasi dan juga kemampuan negosiasi, mempengaruhi dan meyakinkan kawan serta mencurangi lawan.<sup>90</sup> Uniknya, Arthashastra memperkenalkan *utsaha-shakti* mewakili kekuatan pribadi pemimpin yang memberikan dorongan, energi, dan arah ke enam *prakritis* lainnya. Chanakya menetapkan *mantra-shakti* sebagai yang paling penting dari ketiganya. Tiga kekuatan berinteraksi secara "kualitatif" untuk menghasilkan *comprehensive national power*. Gambaran lebih jelas mengenai posisi dari ketiga power ini dapat dilihat pada gambar 4.5 mengenai Ilustrasi tiga *shakti* menurut Chanakya dalam bukunya, Arthashastra.

---

<sup>90</sup> Rangarajan. *op.cit* hlm. 559.



Gambar 4.5 Ilustrasi Tiga Shakti menurut Chanakya  
Sumber : Mishra, Malay, 2017

Dalam penjelasan berikutnya, Chanakya menjelaskan bahwa *prabhava shakti* ini menjadi lebih penting dan tinggi kedudukannya dari pada *utsaha shakti*. Jika dilihat berdasarkan definisi yang diberikan mengenai *prabhava shakti*, kekuatan ini dapat diasosiasikan sebagai sebuah *deterrence effect* yang dimiliki negara<sup>91</sup>. Di mana baik itu kekuatan ekonomi dan militer yang cakap dapat membuat negara memiliki posisi daya tawar dan daya tangkal yang lebih kuat dibandingkan negara yang tidak memiliki kualitas cukup dalam kedua aspek tersebut. Demikian pula yang berkembang pada masa saat ini, tidak dapat dipungkiri bahwa kekuatan militer dan ekonomi sebuah negara menjadi *power* tersendiri yang sering kali membuat negara memenangkan diplomasi yang dilaksanakan di atas meja.

Konsep kekuatan nasional menurut Chanakya berangkat dari keadaan *saptanga* (tujuh elemen pembentuk negara) yang sehat dan kuat.

<sup>91</sup> Malay Mishra, "Unique Approach to Comprehensive National Power Through the Lens of Kautilya's Arthashastra", *Journal of The United Service Institution of India*, Vol. CXLVII, Nomer 607, Januari-March 2017.

Dengan demikian, sudah menjadi tugas penguasa negara untuk memajemen elemen-elemen ini dan mengoptimalkan posisinya hingga mencapai keunggulannya masing-masing. Coates dan Caton (dalam Adityakiran, 2015) berargumen, memiliki kesamaan yang mencolok dengan konsep 'soft - hard power' Nye: *mantrashakti* tidak lain adalah *soft power*, sementara *prabhavashakti* adalah *hard power*, dan di atasnya, Chanakya melayani dimensi lain *utsahashakti* untuk memberikan kekuatan pendorong untuk mengarahkan dua lainnya bersama dengan energi yang terfokus dan kokoh.<sup>92</sup>

Pemikiran mengenai *shakti* yang dibangun 2.300 tahun yang lalu, termasuk kekuatan pendorong *utsahashakti*, menemukan relevansi bahkan sampai hari ini. Genre para pemimpin nasional masa kini seperti Cina, India, Jepang mewakili para *swami* atau penguasa negara menurut Chanakya. Sementara manifestasi *utsahashakti* mereka adalah ciri khas dari kebangkitan Cina, India, dan Jepang dalam percaturan politik global abad sekarang ini.<sup>93</sup>

#### 4.1.4 Konsep Diplomasi dalam Arthashastra

Terkait dengan hubungan antarnegara dan diplomasi, terdapat beberapa pandangan-pandangan Chanakya dalam Arthashastra yang sering kali di rujuk. Salah satunya adalah *Ṣāḍḡuṇya theory* atau lebih sering dikenal dengan *six fold foreign policy*. *Ṣāḍḡuṇya* teori ini merupakan enam kebijakan yang diterapkan oleh negara sesuai dengan keadaan lingkungan strategis dari negara tersebut terhadap negara-negara lain dalam lingkup percaturan politik internasional. Keenam kebijakan itu antara lain: *saṃdhi*, *vigraha*, *asana*, *yana*, *samsraya* dan *dvaiddibhava*. Sementara jika terkait dengan aplikasi dan pendekatan dari diplomasi, Chanakya

<sup>92</sup> G. Adityakiran, "Kautilya's Pioneering Exposition of Comprehensive National Power in the Arthashastra", dalam P. K. Gautam, Saurabh Mishra and Arvind Gupta (eds), *Indigenous Historical Knowledge: Kautilya and His Vocabulary*, Volume I. (New Delhi: IDSA, Pentagon Press, 2015,) hlm. 28–29

<sup>93</sup> Malay Mishra, *op.cit.* 77-109

menjabarkannya ke dalam *upaya*. *Upaya* ini merupakan pendekatan, alat, ataupun cara untuk merealisasikan tujuan atau objek dari diplomasi. *Upaya* ini terdiri dari empat bagian yaitu, *sama, dama, bedha, danda*.<sup>94</sup>

Diplomasi secara umum dalam Arthashastra karya Chanakya dibahas dengan apa yang disebut sebagai *mantrashakti* yang merupakan bagian dari tiga *shakti* atau kekuatan atau *power* yang harus dimiliki sebuah negara untuk mencapai kekuatan nasional yang paripurna. *Mantrashakti* merupakan kekuatan yang dibangun di atas kecerdasan dan kekuatan narasi manusia termasuk perkataan dan tulisan. *Mantrasahakti* dalam Arthashastra dikenal sebagai *soft power diplomacy*, yakni menasehati, mengarahkan, sesuatu melalui kekuatan lisan yang membuat seseorang ataupun sebuah negara bersedia melakukan sesuatu ataupun bersepakat akan suatu hal yang membawa dampak positif terhadap tujuan negara.

Kebahagiaan dan kesejahteraan merupakan tujuan utama negara sedangkan *power* (kekuasaan atau kekuatan) bagi Chanakya merupakan sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Guna memaksimalkan kebahagiaan dan kesejahteraan melalui penggunaan dan pemanfaatan *power* yang lebih besar, Chanakya kemudian menjabarkan enam kebijakan yang harus diikuti oleh *vijigīṣu* sesuai dengan kebutuhan, keadaan serta tujuan yang hendak dicapai. Keenam kebijakan ini dikenal dengan nama *ṣāḍgunya* dan digunakan untuk mengimplementasikan teori mandala lebih tepat dan sesuai dengan keadaan yang terjadi/muncul pada situasi politik tertentu.

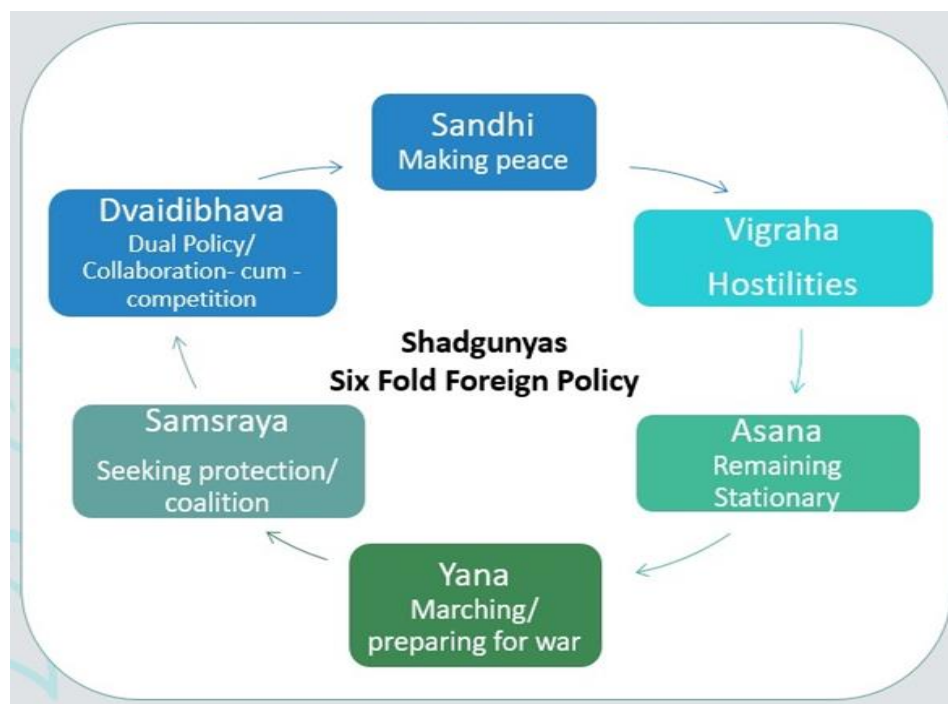
*Ṣāḍgunya Theory (Six Fold Foreign Policy)* atau Enam kebijakan politik luar negeri, menurut Chanakya merupakan penentuan (kebijakan) dari sebuah negara apakah akan mundur, stabil/berdiam diri atau maju pada sebuah keputusan terkait dengan hubungan luar negeri. Keenam kebijakan politik tersebut adalah membuat perdamaian (*saṃdhi*),

---

<sup>94</sup> PK. Gautam, "Relevance of Kautilya's Arthashastra". *Journal of Strategic Analysis*, volume 37, Number 1, (Taylor and Francis, 2013), hlm. 21-28.

melakukan peperangan (*vigraha*), tinggal diam/netral (*asana*), mempersiapkan diri untuk perang atau siaga (*yana*), mencari dukungan atau aliansi (*samsraya*), dan kebijakan ganda (*dvoidibhava*) yaitu membuat perdamaian dengan negara satu sementara itu juga mengadakan peperangan dengan negara lainnya.<sup>95</sup>

Sebuah negara bisa menjalankan lebih dari satu kebijakan di saat yang bersamaan dengan beberapa negara sekaligus. Karena konsep aplikasi dari *śāḍgunya* ini tidak berlaku secara kaku sesuai urutan. Namun sesuai perkembangan kondisi lingkungan strategis negara saat itu. Dengan demikian, kondisi yang sedang berlangsung akan menentukan kebijakan apa yang sebaiknya akan digunakan. Ilustrasi bagian-bagian dari *śāḍgunya* ini dapat dilihat pada gambar 4.6 mengenai ilustrasi *śāḍgunya*.



Gambar 4.6 Ilustrasi Śāḍgunya

Sumber: Hasil Olah Peneliti dari Pemikiran LN Rangarajan, "The Arthashastra", 2018

Bagian Pertama dari *śāḍgunya* adalah *saṁdhi* atau pembuatan perjanjian yang mengandung syarat dan ketentuan tertentu. Prinsip umum

<sup>95</sup> Kautilya Arthashastra 7.13. 42-44: hlm. 366

dalam kebijakan luar negeri adalah ketika sebuah negara berada pada posisi yang relatif lemah dibandingkan kompetitornya, kebijakan perdamaian (*saṃdhi*) haruslah diambil. *Samdhi* sendiri berarti aliansi atau penyesuaian diri, di mana raja/negara berusaha saling menyesuaikan diri/kebijakan dan tidak menyelesaikan permasalahan melalui cara-cara yang bermusuhan atau melalui kekerasan. *Samdhi* bisa saja bersifat sementara namun bisa juga permanen, tergantung dari lingkungan strategis, situasi, kekuatan, serta kepentingan relatif para raja/negara.<sup>96</sup>

Secara garis besar *saṃdhi* terbagi menjadi beberapa jenis sebagaimana dijabarkan dibawah ini.<sup>97</sup>

a. *Hinasaṃdhi*: Ketika *saṃdhi* didefinisikan sebagai Perjanjian Damai (*Treaty of Peace*), maka *hinasaṃdhi* kemudian terklasifikasi lagi menjadi tiga bagian antara lain:

1. *Dandopanata*: Perjanjian damai di mana tentara menjadi subjek utama dalam perjanjian. Contoh modern dari *dandopanata* antara lain: *Strategic Arms Reduction Treaty* (START) atau perjanjian mengenai perlucutan senjata dan *Strategic Arms Limitation Treaty* (SALT) yang ditandatangani oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet.
2. *Kosapanata*: perjanjian damai di mana keuangan atau perekonomian menjadi subjek utama dalam perjanjian. Ketika dua negara menandatangani perjanjian mengenai keuangan seperti misalnya menentukan *common budget*, penghapusan hambatan perdagangan (*trade barrier*) serta perjanjian dagang hal hal tersebut dikategorikan ke dalam *Kosapanata*.
3. *Desopanata*: perjanjian damai di mana tanah atau wilayah menjadi subjek utamanya. Salah satu contoh perjanjian damai *desopanata* terjadi pada tahun 1903, ketika Prancis

<sup>96</sup> Satish Karad, *op.cit.* hlm. 328

<sup>97</sup> Tridib Chakraborti, "Contemporary Relevance of Kautilya's Mandala Theory and Diplomacy", *Politico*, 2016. Volume 3. Number 2, hlm 10-16

memutuskan untuk memberikan Inggris kebebasan di Mesir sementara sebagai gantinya Inggris setuju untuk mengakui Maroko sebagai protektorat Perancis.

b. Jenis kedua adalah ketika *sam̄dhi* digunakan dalam bentuk aliansi dan perjanjian yang berdasarkan pada aliansi maka *sam̄dhi* terbagi menjadi lima jenis, antara lain:

- 1) *Mitrasam̄dhi*: Perjanjian dengan sekutu mengenai beberapa syarat dan ketentuan. *Mitrasam̄dhi* merupakan aliansi pertemanan. Contoh *mitrasam̄dhi* zaman modern adalah Perjanjian persahabatan Indo Soviet (*Indo Soviet Treaty of Friendship*) pada tahun 1971. Perjanjian tersebut ditandatangani antara India dan Uni Soviet yang didasarkan pada beberapa syarat dan ketentuan yang telah ditentukan. Perjanjian ini dibentuk sebagai respon atas ditandatanganinya perjanjian aliansi Pakistan dengan Amerika Serikat. Dengan demikian, jika Amerika Serikat menyerang India dalam upayanya mendukung Pakistan sebagai aliansinya, maka Uni Soviet akan membantu India.
- 2) *Hiranyasam̄dhi*: terjadi ketika dua negara menandatangani perjanjian yang bertujuan untuk mengakumulasi emas atau keuangan negara.
- 3) *Bhumisam̄dhi*: terjadi ketika dua negara menandatangani perjanjian aliansi untuk pemindahan/transfer/penyerahan tanah atau wilayah
- 4) *Karmasam̄dhi*: perjanjian untuk menggunakan tentara untuk kepentingan bersama, atau pertukaran militer. Pada zaman modern ada beberapa contoh aplikasi dari *karmasam̄dhi* seperti pada tahun 1956 di mana Inggris dan Perancis berusaha mengirim pasukan ke Terusan Suez untuk “melindungi Terusan Suez dari konflik Israel-Mesir” dan mempertahankan kendali atas kanal yang dinasionalisasi oleh

Presiden Mesir Nasser. Contoh lainnya adalah Perjanjian Indo-Srilanka pada 1988 di mana baik India dan juga Srilanka memutuskan untuk bersama-sama menggunakan pasukan tentaranya untuk menghilangkan kelompok pemberontak Macan Tamil di Sri Lanka.

- 5) *Anavasitasam̐dhi*: perjanjian aliansi yang dibuat untuk membantu menjajah tempat yang tidak didiami.

Bagian kedua dari *ṣāḍgunya* adalah *vigraha*. *Vigraha* merujuk pada kebijakan yang menunjukkan permusuhan kepada negara tetangga atau negara lain. Karena negara selalu ada dalam posisi yang saling berperang (berebut pengaruh) dan mencari kekuasaan maka kebijakan luar negeri yang bermusuhan terhadap beberapa negara yang sama kuat atau pun berada pada posisi subordinat itu tetap diperlukan.<sup>98</sup> Kebijakan ini memiliki dua dimensi, yaitu dimensi defensif dan juga offensif. Defensif merujuk kepada keadaan di mana negara memiliki keyakinan akan kekuatannya untuk menghalau serangan musuh. Sedangkan sisi offensif merujuk kepada keadaan di mana negara memiliki keyakinan bahwa posisi mereka cukup aman dan dapat menghancurkan musuhnya, dan atau merebut wilayah musuh, karena ia terlibat dalam medan pertempuran yang lain.<sup>99</sup> Namun hal yang kemudian perlu digaris-bawahi adalah Chanakya sangat cemas terkait dengan untung-rugi dari kebijakan ini. Maka dari itu, Chanakya lebih menekankan perjuangan diplomatik (*saṁdhi*) daripada konflik bersenjata (*vigraha*). Chanakya menyatakan bahwa tetangga selayaknya selalu diserang dengan serangan-serangan diplomatik.<sup>100</sup>

Bagian ketiga dari *ṣāḍgunya* adalah *asana*. Kebijakan ini diambil ketika negara memilih untuk menunggu dengan harapan musuh mereka melemah dengan sendirinya atau menemui kesulitan/malapetaka. Misalnya

<sup>98</sup> Chandrashekharan, Pravin. *Op.Cit.* hlm. 13

<sup>99</sup> Karad *Op.Cit.* hm. 328-9

<sup>100</sup> Chakraborti, *Op. cit* hlm. 12

musuh terlibat perang dengan front lain dengan demikian kekuatannya semakin melemah dan dengan sendirinya sang vijigīṣu menjadi lebih kuat dari musuh itu sendiri.<sup>101</sup> Secara alami, kebijakan ini sering kali sejalan dengan kebijakan *saṃdhi*. Tetapi pada saat yang sama dapat dikuatkan dengan kebijakan *vigraha*. Misalnya, dengan merayu subyek musuh dari kesetiaan mereka dengan sarana pertikaian dan propaganda, seseorang akan mencoba melemahkan musuh secara diam-diam.<sup>102</sup>

Bagian keempat dari *śāḍgūnya* adalah *yana*. *Yana* berarti kesiapan untuk bergerak. Pasukan penyerbu dapat mulai bergerak melakukan pawai hanya jika mereka telah benar-benar menjaga wilayah negaranya (kondisi negara aman). Sang vijigīṣu juga selayaknya hanya melakukan *yana* kalau dia yakin dapat menghancurkan lawannya (kemenangan sudah dapat dipastikan).

Bagian kelima dari *śāḍgūnya* adalah *samsraya*. Ini adalah kebijakan perlindungan di mana negara yang lebih kuat mengintervensi dan melindungi negara yang lemah. Chanakya mendukung kebijakan ini, ketika negara yang lebih kuat membutuhkan perisai untuk melindungi dirinya dari kekuatan yang setara. Negara dapat menggunakan kebijakan perlindungan ini baik untuk negara ketiga dan atau menggunakan aliansi ini untuk mempertahankan diri dari musuh potensial. Kebijakan ini terutama direkomendasikan untuk raja lemah yang diserang atau diancam akan diserang oleh musuh yang kuat.

Bagian keenam dari *śāḍgūnya* adalah *dvaiddibhava*. *Dvaiddibhava* merupakan kebijakan tujuan ganda, di mana *saṃdhi* mencari bantuan dalam bentuk perbendaharaan dan pasukan dari satu raja untuk melancarkan permusuhan terhadap raja lain. Kebijakan ini ditujukan untuk raja yang sama-sama kuat posisinya dengan musuh dan dia tidak dapat memenangkan pertempuran tanpa kekuatan tambahan dari sekutunya.<sup>103</sup>

---

<sup>101</sup> Arthashastra 7.1.34

<sup>102</sup> Arthashastra 7.4.5-12

<sup>103</sup> Arthashastra 7.1.13-18

Salah satu aplikasi dari *dvaiddibhav* pernah dilakukan oleh Henry Kissinger. Ia membuat strategi di mana Amerika Serikat mendekati Cina dan membuat aliansi sedemikian rupa sehingga mempersempit kemungkinan hubungan Rusia dan Cina akan lebih dekat daripada hubungan antara Cina dan Amerika Serikat. Dalam kerangka teori Mandala Chanakya menyatakan bahwa *Dvaiddibhav* terbagi ke dalam lima kategori:

- a. *Mithyachitta* merupakan jenis kebijakan ganda dengan cara memasang *mithya* atau wajah palsu atau kesadaran semu. Dalam prakteknya itu seperti berpura-pura ramah walaupun sebenarnya ia tidak menyukai seseorang/ negara tersebut.
- b. *Mithyavachanasamyam* merupakan jenis kebijakan ganda dengan berbicara suatu hal namun dalam pikirannya adalah hal yang berlainan. Contohnya adalah Perjanjian non agresi antara Nazi Jerman dan Polandia di tahun 1933 di mana Hitler mengatakan bahwa ia tidak berniat menyerang Polandia. Sementara yang dilakukan adalah kebalikkannya di mana pada September 1939 Hitler justru menginvasi Polandia yang berujung pada pecahnya Perang Dunia Kedua.
- c. *Mithyakarana* merupakan jenis kebijakan ganda dengan melakukan suatu hal yang tampaknya untuk kepentingan negara lain namun menumbangkan hal yang sama untuk memenuhi kepentingan dirinya sendiri. Contohnya adalah Presiden Sri Lanka Jaya Wadene yang menipu Rajiv Gandhi agar India terlibat dalam krisis LTTE (Macan Tamil). India terjebak dalam trik tersebut. Tentara India harus berurusan dengan peperangan, kekacauan, pengungsi, bahkan Rajiv Gandhi membayar hal tersebut dengan sangat mahal, ketika milisi Macan Tamil berhasil membunuhnya. Sementara disisi lain Presiden Sri Lanka Jayawardene berhasil mempertahankan keamanan wilayahnya melalui darah orang-orang India.
- d. *Ubhayavetana* merupakan jenis kebijakan ganda dengan menerima upah dari musuh secara diam-diam saat sedang bertugas melayani

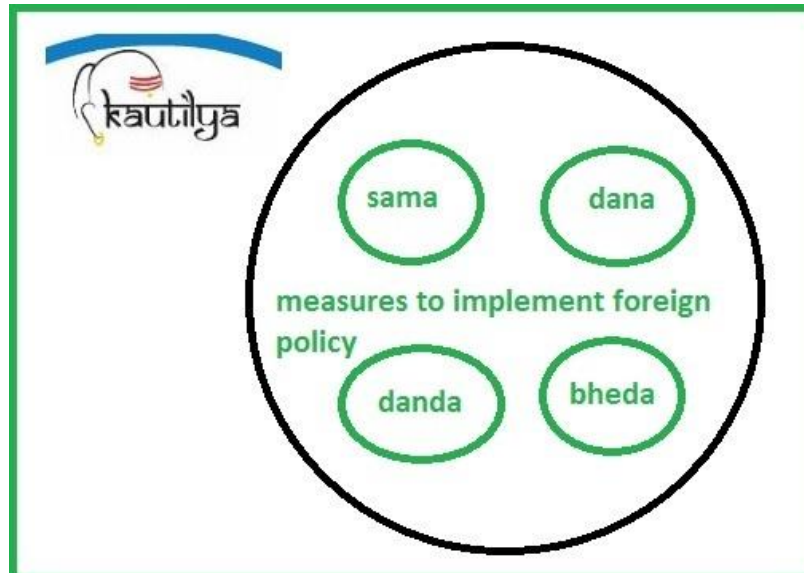
tuannya. Bahasa mudahnya adalah agen ganda yang bekerja untuk kedua belah pihak dalam ranah spionase.

- e. *Yugmaprabhritaka* merupakan jenis kebijakan ganda dengan berpura-pura mengumpulkan kekuatan dan uang untuk sebuah ekspedisi namun justru membelanjakan hal tersebut untuk kepentingannya sendiri. Contohnya pada tahun 1950 David Ben Gurion dari Israel meminta Kanselir Konrad Adenauer uang sejumlah satu miliar dollar sebagai bentuk “kompensasi atas kekejaman Nazi terhadap orang Yahudi, namun ia justru menghabiskan uang itu untuk membeli senjata yang dipakai untuk melawan orang-orang Arab.

*Ṣāḍgunya* atau *six fold Foreign Policy* merupakan kebijakan yang dapat diambil oleh penguasa negara dalam kerangka hubungan antar negara. Untuk menjalankan keenam kebijakan ini terdapat empat cara atau jalan (*catur upaya*) yang umumnya ditempuh dalam diplomasi menurut Chanakya.

*Catur Upaya* merupakan empat pendekatan atau cara untuk mencapai tujuan nasional atau bisa dikategorikan sebagai empat metode diplomasi sebuah negara. *Catur upaya* ini telah dijelaskan dalam *Dharmashastra*. *Catur upaya* terdiri dari empat bagian berbeda. Pertama, *sama (conciliation)* perdamaian, konsiliasi atau penyesuaian. Kedua, *dama (gift)* pemberian, kado atau hadiah. Ketiga, *bedha (rupture)* perpecahan atau perselisihan. Dan keempat adalah *danda (force)* kekerasan, atau pemaksaan. Aplikasi dilapangan yang terjadi adalah adanya tumpang-tindih dari keempat upaya ini dan enam kebijakan luar negeri, tergantung dari keadaan lingkungan strategis sang *vijigīṣu* saat itu. Namun Kangle (1986) menyatakan *ṣāḍgunya* itu merujuk hanya pada penggunaan kebijakan luar negeri semata. Sementara *catur upaya* merujuk pada aplikasi yang lebih luas dan bisa dimanfaatkan untuk mencapai tujuan lain yang mungkin tak

berkaitan dengan negara sama sekali, seperti tujuan perseorangan.<sup>104</sup> Ilustrasi mengenai *catur upaya* dapat dilihat pada gambar 4.7.



Gambar 4.7 Ilustrasi *Catur Upaya* menurut Chanakya  
<https://www.quora.com/2015>

Konsiliasi (*sama*) dicapai dengan memuji keunggulan dari kualitas negara/seseorang, pekerjaan, sifat, atau kekayaan, dengan memuji hubungan umum, menjelaskan keuntungan yang akan diperoleh bagi kedua belah pihak, dan bisa juga dilakukan dengan pemberian suatu kehormatan atau peringkat tinggi. Menenangkan lawan ataupun kawan dengan pemberian hadiah (*dana*) dicapai dengan memberi imbalan dengan uang, memberikan bantuan, membebaskan dari pajak, dan memberikan pekerjaan. Menurut Chanakya, terdapat lima jenis hadiah yang bisa diberikan untuk memenangkan hati lawan maupun kawan. Pertama, menghapuskan hutang mereka yang dipinjam dari kita. Kedua, melanjutkan pembayaran hutang mereka yang sudah dilakukan sebelumnya. Ketiga, mengembalikan sesuatu yang diterima. Keempat, memberikan sesuatu

<sup>104</sup> Kangle, R.P. 1986. *Op.cit.* hlm. 251.

yang baru dari kekayaan seseorang. Kelima, adalah izin untuk mengambil sesuatu dari musuh.<sup>105</sup>

Menabur perselisihan (*bheda*) dilakukan di antara musuh dengan menciptakan kecurigaan bersama di antara mereka atau dengan mengancam salah satunya. *Force (danda)* dapat digunakan untuk merampas harta, kebebasan, atau kehidupan seseorang, dan didalamnya melakukan termasuk penjarahan, pelecehan, bahkan pembunuhan. Konsep-konsep ini dapat digunakan secara terpisah atau kombinasi secara bersamaan, tergantung pada situasi. Misalnya, Chanakya merekomendasikan penggunaan konsiliasi dan penenangan dengan hadiah untuk seorang putra atau saudara. Bagi warga negara, atau anggota tentara, menenangkan dengan hadiah dan/atau menabur perpecahan yang terbaik. Untuk pangeran tetangga, tabur pertikaian dan penggunaan kekerasan dianjurkan. Sementara itu untuk melawan musuh/negara lain Chanakya menyarankan penggunaan *catur upaya* ini pula.

*In the enemy's country, those who are easily subverted shall be won over by conciliation (sama) and gift (dama). Those who are not easily subverted shall be tackled by sowing dissension (bedha), use of force (danda) or by pointing out to them the defects of their own king. (Arthashastra 1.14.12)*

Chanakya menunjukkan bahwa dalam kasus-kasus sekutu dan musuh, kombinasi metode memastikan keberhasilan sebagai teknik yang berbeda saling memperkuat. Beberapa metode ideal, dalam kasus tertentu, dan lainnya tidak diperlukan. Perdamaian cukup untuk berurusan dengan menteri musuh yang kesetiaannya tidak pasti, sementara menenangkan dengan hadiah untuk menteri musuh yang tidak jujur (pengkhianat) bisa manjur. Perselisihan sangat efektif terhadap konfederasi, dan kekuatan-benar diterapkan di paling menguntungkan kali-sering berhasil melawan kuat (yang mungkin menemukan pembalasan atau melanjutkan biaya

---

<sup>105</sup> Kangle. 2010. *The Kautilya Arthashastra* buku 9, bab 6 and ayat 24 dalam bahasa Sanskrit menjelaskan mengenai jenis-jenis hadiah yang dapat diberikan untuk menciptaka situasi tertentu. Lihat Kangle, *The Kautiliya Arthasastra*, Part 2, hlm. 423.

permusuhan tidak efektif). Metode menciptakan perselisihan paling efektif terhadap konfederasi, dan kekuatan - ketika diterapkan dengan benar dan di saat yang paling tepat - sering berhasil melawan yang berkuasa/paling kuat (yang mungkin bisa saja kemudian menemukan cara melakukan pembalasan dendam atau justru malah memilih untuk melanjutkan permusuhan yang tidak efektif).<sup>106</sup>

Sementara enam ukuran kebijakan luar negeri digunakan oleh raja untuk mengatur negara, keempat konsep sikap memiliki penerapan yang lebih luas dan melintasi batas-batas semua. Sebagai contoh, Chanakya merekomendasikan bahwa penakluk yang telah memastikan pengajuan seorang raja harus memperlakukannya dengan hormat, kecuali raja menyimpan niat bermusuhan. Dengan memperlakukan bawahan secara tidak adil, ia tidak hanya menghadapi prospek pembalasan, ia cenderung menimbulkan murka lingkaran negara. Penakluk diminta untuk menghormati raja-raja lain di sekitar kerajaannya, atau mereka dapat bersatu dan menggagalkan aspirasi penakluk penaklukan dunia<sup>107</sup>.

Chanakya sendiri berpendapat bahwa ada dua acara yang dapat ditempuh oleh *vijigīṣu*<sup>108</sup> guna mencapai tujuannya, yaitu perang atau diplomasi. Ada beragam strategi diplomasi yang dijabarkan oleh Chanakya dalam Arthashastra, salah satunya adalah *atisamdhāna* yang merujuk pada pembuatan pakta atau perjanjian dengan pihak lain (negara lain) dan menggunakan perjanjian-perjanjian ini untuk mengecoh dan mengguguli pasangan potensial mereka. Bentuk sederhana dari istilah ini kemudian

---

<sup>106</sup> The Kautilya *Arthashastra* buku 9, bab 5 and ayat 12-28 dalam bahasa sansekerta menjelaskan penggunaan perselisihan untuk memperoleh keuntungan. Lihat Kangle, *The Kautilya Arthasastra*, Part 2, hlm. 420-421.

<sup>107</sup> Kangle.1986. *op.cit.* hlm. 255

<sup>108</sup> Kautilya menjangkarkan idenya pada konsep Raja sebagai *vijigīṣu* (orang yang ingin menaklukkan), sebuah istilah teknis yang merujuk pada arti seorang penguasa yang menginginkan dan berkomitmen penuh untuk menaklukkan. Namun jika kita arahkan pada pengertian kekinian dengan situasi percaturan politik internasional *vijigīṣu* kemudian dapat dimaknai sebagai sebuah negara yang menginginkan untuk memperluas pengaruhnya (*power*) ke negara-negara lain secara terus-menerus.

dikenal dengan *saṃdhi* yang tergabung ke dalam bagian pertama dari *ṣāḍgunya* atau enam kebijakan politik luar negeri (*six fold foreign policy*).

Istilah *saṃdhi* sendiri merujuk kepada pembuatan pakta atau aliansi dengan penguasa lain (negara lain) untuk mencapai tujuan bersama, seperti misalnya menyerang pihak ketiga. Bahkan jika ditelusuri lebih lanjut, Chanakya juga menginstruksikan untuk menggunakan aliansi sebagai peluang untuk tidak hanya mengalahkan musuh bersama dan mencapai tujuan bersama. Namun juga sebagai sebuah proses untuk melemahkan atau mengalahkan sekutu *vijigṛṣu* itu sendiri. Strategi ini kemudian terlihat seperti membunuh dua burung dengan satu batu. Ini merupakan bagian dari “*Mantrayuddha*” atau “perang kecerdasan” yang dijabarkan oleh Chanakya pada keseluruhan isi dari bagian buku ke-XII nya<sup>109</sup>.

Menariknya, Chanakya menempatkan *Mantrashakti* (diplomasi) sebagai sebuah kemampuan terkuat yang harus dimiliki dengan cakap oleh sebuah negara. Dalam ketiga *shakti*, *mantra shakti* ini paling penting dan paling kuat. Dengan demikian dapat dipastikan kecenderungan untuk menggunakan kekuatan narasi (menasehati, mempengaruhi, menarik dan mengkooptasi) negara-negara lain dalam kancah hubungan internasional seharusnya tidak luput dari perhatian negara. Chanakya mengibaratkan hal ini dalam sebuah ungkapan “*anak panah yang dilepaskan oleh seorang pemanah bisa saja membunuh satu orang atau bahkan justru tidak membunuh seorangpun. Namun kecerdasan yang dijalankan oleh orang bijak bahkan bisa membunuh anak yang ada di dalam kandungan*”.<sup>110</sup>

Arthashastra karya Chanakya sesungguhnya memberikan penekanan yang lebih kepada peranan diplomasi namun tidak memberikan preferensi atas perang. Hal ini kemungkinan besar karena sistem sosial masyarakat kerajaan Dinasti Maurya saat itu, yang menitikberatkan

<sup>109</sup> Patrick Olivelle, “Economy, Ecology and National Defence in Kautilya’s Arthashastra”, dalam *Indigenous Historical Knowledge: Kautilya and His Vocabulary*. (New Delhi: Pentagon Press and Institute for Defence Studies and Analyses, 2016), hlm. 10-11.

<sup>110</sup> KA 10:6.51; Kangle, *The Kautiliya Arthashastra, Part II*, n. 5, hlm. 458; Rangarajan, *Kautilya: The Arthashastra*, n. 20, hlm. 625

pengelolaan negara pada kaum Ksatria, yang seolah-olah dilahirkan dan ditakdirkan untuk “berperang”. Diplomasi bagi Chanakya dijalankan untuk mencapai beberapa hal seperti menarik sekutu, menunda perang jika sebuah negara itu lemah dan mudah diserang dan untuk membuat *post war arrangements for a new order*.

Berdasarkan Arthashastra karya Chanakya, hubungan antar negara dibangun dan dibawa oleh *Duta* atau *Ambassadors*. Chanakya kemudian memberikan tiga kategorisasi mengenai Duta Besar. Pertama adalah duta besar berkuasa penuh (*plenipotentiary*), duta/utusan dengan kuasa negosiasi terbatas, dan seorang utusan yang bertugas membawa pesan saja. Perbedaan mendasar dalam tugas duta pada masa Chanakya dengan masa sekarang adalah perintah Chanakya yang mengharapkan para duta besar Kerajaan Maurya juga bertindak dalam spionase (kegiatan intelijen), tindakan sabotase bahkan yang paling penting adalah ikut aktif dalam menjalankan pembelotan dari tentara musuh, untuk menguntungkan negaranya sendiri.<sup>111</sup>

Baik diplomasi maupun perang keduanya dijalankan oleh Chanakya dengan tujuan untuk memperoleh *power* yang lebih besar bagi negaranya. Namun yang kemudian perlu dicermati adalah penekanan Chanakya bahwa *power* bukanlah tujuan akhir yang harus dicapai oleh negara. Justru *power* adalah alat yang digunakan untuk mencapai kepentingan yang lebih besar, yaitu *yogaksema* atau kebahagiaan, kesejahteraan dan keamanan rakyat.

*Strength is power, and happiness is the end. [...] hence a king shall always endeavour to augment his own power and elevate his happiness. Therefore, for the augmentation of power the general rule applies that whoever is inferior to another shall make peace with him; whoever is superior in power shall wage war.*<sup>112</sup>

Melalui sutra di atas, sangat jelas terlihat bahwa *power* bukanlah tujuan akhir, namun lebih kepada sebuah cara untuk memperoleh *power* yang

<sup>111</sup> Harjeet Singh, opcit. hlm. 25

<sup>112</sup> Harjeet Singh, opcit hlm 28-29. *Kautilya Arthashastra* 6.2.30; 6.2.35-37

lebih besar. *Power* yang lebih besar dalam sistem internasional saat itu<sup>113</sup> dijadikan sebagai daya tangkal untuk negara tetangga dan negara-negara lainnya. Ketika sang *vijigīṣu* memiliki power yang besar, negara lain akan segan atau bahkan tidak berani menyerang sang *vijigīṣu*. Dengan demikian rakyatnya tidak menghadapi ancaman serangan dari negara lain. Keamanan membuat roda perekonomian mereka berjalan lebih lancar dan kesejahteraan akan hadir seiring berjalannya waktu. Ketika keamanan dan kesejahteraan ada di masyarakat maka masyarakat akan merasakan kebahagiaan.

## 4.2 Pembahasan

### 4.2.1 Konsep Pemetaan Ancaman dalam Arthashastra sebagai dasar Strategi Diplomasi Pertahanan

Pemetaan ancaman menurut Chanakya dalam Arthashastra merujuk kepada pembahasan pada sub-bab sebelumnya, mendefinisikan bahwa ancaman dapat berasal dari dalam negara ataupun dari luar negara. Ancaman dari dalam negara berupa pemberontakan, korupsi, kekeringan, kudeta, perampokan, kerusakan, dan lain sebagainya yang ranah terjadinya berasal dari unsur yang terdapat di dalam negara seperti pejabat pemerintah yang membelot, kelompok yang tidak taat dengan raja/penguasa negara, dan pejabat yang tidak jujur. Sementara ancaman dari luar negara berasal disebutkan seperti invasi/upaya menaklukkan dari musuh, ataupun serangan intelijen negara asing untuk melemahkan elemen pembentuk negara (*saptanga*). Penjabaran ini berkenaan dengan teori ancaman, sebagaimana dibahas dalam *The Origin of Threats*<sup>114</sup> bahwa ancaman bagi sebuah negara tidak hanya datang dari luar negara

---

<sup>113</sup> Saat itu sistem internasional yang anarki membuat Chanakya berpikir bahwa hanya ada dua pilihan dalam sistem internasional, antara menaklukkan atau ditaklukkan. Agar negara tidak ditaklukkan oleh negara lain ia harus bisa lebih kuat dari negara yang hendak menaklukkannya. Sehingga pencarian power secara terus-menerus dilaksanakan untuk memastikan bahwa negara tidak akan diserang, dan walaupun diserang tidak akan menyebabkan kekalahan yang fatal/ hancurnya negara.

<sup>114</sup> Banyu Perwita, *op. cit.* hlm. 123

(eksternal) namun juga dari dalam negara (domestik). Namun yang perlu kembali ditekankan adalah bagi Chanakya, tidak peduli dari mana asal ancaman, baik itu berasal dari eksternal maupun domestik, sepanjang ia dapat melemahkan salah satu atau beberapa elemen pembentuk negara (*saptanga*) maka ancaman tersebut harus segera ditanggulangi.

**Tabel 4.1 Perbandingan Sistem Pemetaan Ancaman Antara Konsep Barat Dengan Pandangan Chanakya Dalam Arthashastra**

<b>Variable</b>	<b>Western concept</b>	<b>Chanakya dalam Arthashastra</b>
<b>Sumber ancaman</b>	<p><i>The Origin of Threat:</i></p> <p>Konsep tradisional: Ancaman datang dari negara asing (luar negara)</p> <p>Konsep non-tradisional: Ancaman datang dari lingkungan domestik (dalam negeri) dan internasional (luar negeri)</p>	<p><i>Vyasana</i> : Malapetaka/ ancaman/ bencana.</p> <p>ancaman domestik: dari dalam negara seperti: pemberintakan, dekadensi penguasa, wabah penyakit, kelaparan pemberontakan, korupsi bencana alam dan kejahatan domestic.</p> <p>Bencana dari luar negara: invasi/ serangan negara lain, infiltrasi agen asing kedalam negara, sekutu yang membelot</p>
<b>Sifat Ancaman</b>	<p>Tradisional: ancaman bersifat militeristik, pendekatan terhadap ancaman mengutamakan peran militer atau penggunaan kekerasan</p> <p>Non-tradisional: ancaman bersifat kompleks, gabungan antara ancaman berdifat militeristik dan juga ancaman</p>	<p>Tradisional: ancaman bersifat militeristik, pendekatan terhadap ancaman mengutamakan peran militer.</p>

	terkait dengan ilpoleksosbudhankam,	
<b>Aktor</b>	Negara dan non negara (kelompok teroris, bandar narkoba, Transnational Organized Crime, dll)	Aktor negara beserta angkatan bersenjata dan intelejen negara)
<b>Paradigma</b>	Konstruktivis,	Realis
<b>Pemetaan ancaman dari luar negara</b>	Analisa SWOT, Geostrategi, Negara berkompetisi dan atau bekerjasama atas suatu isu	Teori Mandala, Konstelasi geopolitik, negara selalu bersiap melakukan penaklukan atau bersiap menghadapi upaya penaklukan dari negara lain

Sumber: Hasil Olah Peneliti dari berbagai sumber, 2018.

Merujuk pada tabel 4.1 mengenai perbandingan konsep pemetaan ancaman *western* dan berdasarkan pandangan Chanakya dalam karyanya, Arthashastra, maka terlihat jelas bahwa sesungguhnya pemetaan ancaman secara tradisional telah dipaparkan dalam arthasahstra yang dibuat pada 350-283 SM. Konsep arthasahstra dalam pemetaan ancaman ini masih merujuk pada *nature and origin of threat* yang bersifat tradisional (militeristik). Hal ini dapat dimengerti karena paradgima yang berkembang saat itu adalah realisme dan ancaman belum terproliferasi lebih kompleks seperti jaman modern. Terlepas dari hal tersebut, chanakya sudah meletakkan nilai-nilai dasar terkait ancaman yang non-tradisional pada terminologi *vyasana* yang berasal dari dalam negara seperti bencana alam, kelaparan, dekadensi penguasa, wabah penyakit, dll.

Chanakya memberikan penekanan yang cukup serius bagi ancaman eksternal. Dengan demikian untuk mencegah ancaman yang berasal dari luar negara tersebut Chanakya menjabarkan teori mengenai Mandala/ *circle of state*. Di mana sang *Vijigīṣu* memetakan negara mana yang menjadi musuh alamiahnya, musuh potensialnya, dan juga sekutu yang dapat membantunya. Hal ini sebagaimana telah dijelaskan bahwa negara

tetangga merupakan musuh alami, di mana ancaman terkait gesekan perbatasan dan kemungkinan untuk penyerangan terhadap sang *Vijigṭṣu* jauh lebih tinggi. Untuk memahami penetapan teori ini, secara hermeneutik kita perlu menggunakan pemikiran hermeneutika Hans-Georg Gadamer (dalam Susanto, 2016) yakni teori kesadaran (*Historically Effected Consciousness*) di mana pemahaman seorang penafsir ternyata dipengaruhi oleh situasi hermeneutik tertentu yang melingkupinya, baik itu tradisi, kultur, maupun pengalaman hidupnya.<sup>115</sup> Dengan demikian dalam upaya menafsirkan dan memahami teori Mandala yang dikemukakan oleh Chanakya ini diperlukan kesadaran penafsir bahwa kemungkinan situasi hermeneutiknya saat itu berpengaruh terhadap hasil penafsirannya.

Dalam proses penyusunan Arthashastra, Chanakya merujuk berbagai filsafat-filsafat politik yang telah ada kemudian memberikan penafsiran serta komentar sesuai dengan analisa lingkungan strategis Kerajaan Maurya saat itu. Dengan demikian, ketika penafsir hendak memahami ide-ide Chanakya, maka penafsir Arthashastra juga perlu mengantisipasi hal-hal tersebut. Dengan kata lain, dalam upaya untuk memahami paradigma berpikir serta maksud Chanakya pada beberapa teori yang dikemukakan, maka penafsir masa sekarang perlu melihat lingkup sejarah yang meliputi Chanakya saat itu. Lingkup sejarah ini merujuk pada beberapa aspek seperti pengalaman hidupnya, kecenderungan hubungan antar negara, dan kultur serta struktur sosial yang berkembang pada saat itu.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa penetapan teori *circle of state* atau teori mandala ini merujuk pada keadaan dunia saat itu pada abad ke 4 SM. Saat itu situasi kerajaan Maurya bersifat *land-base*, di mana negara-negara tetangganya berbatasan secara darat sehingga mobilisasi pasukan dari satu negara untuk menyerang negara lain jauh lebih mudah jika dibandingkan dengan negara yang dipisahkan oleh lautan. Selain itu,

---

<sup>115</sup> Edi Susanto, *op.cit.* hlm 52

sistem internasional saat itu juga belum mengenal penghormatan atas kedaulatan negara.<sup>116</sup> Hal tersebut membuat satu negara dapat menyerang negara lain disebelahnya untuk memperluas wilayah, menambah sumber daya alam dan pendapatan melalui pajak atau upeti dari negara yang telah ditaklukkan. Keadaan ini kemudian menjadi salah satu alasan mengapa negara yang bertetangga secara langsung adalah musuh alami karena mereka-lah yang paling mungkin melakukan penyerangan terhadap wilayah kekuasaan sang *vijigīṣu*. Maka dari itu, bagi Chanakya negara tetangga (yang menunjukkan sikap bermusuhan/selalu berselisih) adalah entitas politik yang paling perlu diwaspadai. Maka dari itu, adalah sebuah kewajaran yang bisa dimengerti ketika Chanakya merasa *insecure*, lalu kemudian mengaggap negara yang bertetangga merupakan musuh alami dan potensial untuk menyerang sang *Vijigīṣu*. Maka kemudian untuk meredam kekalahan jika terjadi penyerangan yang dilakukan oleh musuh alami ini, negara harus memiliki militer, benteng, dan ekonomi yang kuat.

Namun pada praktek zaman sekarang, negara tidak lagi bisa menggunakan teori *circle of state* secara harfiah di mana negara yang bertetangga adalah musuh alamiah dan musuh paling potensial. Secara konstelasi geopolitik ancaman paling besar (perselisihan tapal batas, pelanggaran wilayah kedaulatan) memang sangat memungkinkan terjadi diantara negara yang saling bertetangga (berbatasan langsung). Namun kemudian yang perlu digaris-bawahi adalah bukan dengan serta merta menjadikan negara tetangga menjadi musuh sungguhan. Sebagaimana Chanakya kemudian melanjutkan penjelasannya bahwa tidak semua negara yang bertetangga menjadi musuh. Posisi tersebut tergantung dari bagaimana sikap mereka (kebijakan yang diambil, respon terhadap isu yang berkembang) terhadap sang *Vijigīṣu* lah yang menentukan apakah mereka akan menjadi musuh (*aribhavin*) atau kawan (*mitrabhavin*). Keadaan ini yang membuat negara kemudian bisa membentuk konstelasi

---

<sup>116</sup> Sebagaimana diatur dalam traktat Westphalia

mandala yang saling-tumpang-tindih dengan negara tetangga dan negara lainnya berdasarkan isu, kebijakan ataupun kepentingan yang sedang diperjuangkan oleh negara tersebut.

Jika kemudian diarahkan terhadap pemetaan ancaman yang dilakukan oleh Indonesia, maka dapat terlihat bahwa Indonesia juga mengantisipasi ancaman yang paling potensial muncul dari negara-negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia. Hal yang perlu dicermati kemudian adalah cara Indonesia untuk “menghadapi” negara-negara tetangganya dalam konstelasi geopolitik (ASEAN, Australia dan juga Pasifik). Indonesia sejauh ini tampaknya berupaya menempatkan negara-negara yang berbatasan langsung dengannya pada posisi mitra. Hal ini terlihat dari *range* urutan kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia. Indonesia menempatkan negara yang berbatasan langsung sebagai negara-negara yang harus diberikan prioritas lebih dulu dalam porsi kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia<sup>117</sup>.

Upaya yang dilakukan Indonesia dapat dipandang sebagai bentuk penggalangan kekuatan, di mana kompetitor potensial (negara tetangga) digalang dan dikondisikan agar tidak melakukan serangan terhadap Indonesia. Pembuatan pakta-pakta kerjasama dan upaya memunculkan *common interest* dengan negara tetangga ini dapat dilihat sebagai upaya pencegahan agar negara tetangga tidak melakukan serangan terhadap Indonesia, karena mereka juga memiliki kepentingan di Indonesia dan dengan melakukan serangan tidak hanya akan menimbulkan kerugian pada Indonesia semata, namun juga kerugian di pihak mereka. Keunikan ini kemudian dapat tercermin dari salah satu jargon politik luar negeri yang berkembang pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yakni *Zero Enemy Thousand Friends*. Di mana Indonesia mengambil peranan sebagai negara cinta damai yang berupaya selalu

---

<sup>117</sup> Wawancara Dirjenstrahan Kemhan tahun 2014-2017, Letjen TNI (Purn) Yoedhi Swastanto (1 November 2018); Kasubdit Multilateral Dirjenstrahan Kemhan, Klo. Kav. Oktaheroe Rasmi (27 September 2018), Ricky E.V. Ichsan (Kepala Subdit Perlucutan Senjata Pemusnah Masal dan Senjata Konvensional Kemlu RI (6 November 2018).

membuat pertemanan dengan negara-negara lain di dunia, dan tidak menetapkan satu negara pun secara resmi sebagai musuhnya. Jika dipandang dalam paradigma realisme hal ini terkesan utopis, di mana tidak ada satupun negara yang tidak memiliki musuh atau tiada satupun negara yang tidak berselisih paham dengan negara lain.

Namun Indonesia nampaknya konsisten dengan jargon politik luar negeri ini. Terbukti dari beberapa kasus-kasus di mana Indonesia berselisih paham dengan beberapa negara tetangganya seperti Malaysia<sup>118</sup> ataupun Australia<sup>119</sup>. Secara teoretis selisih paham yang terjadi antar negara ini sangat mungkin memicu permusuhan atau setidaknya dijadikan dasar untuk membuka peluang terhadap konflik politik. Namun yang perlu digaris-bawahi kemudian adalah hal-hal tersebut tidak membuat Indonesia serta merta menyebut mereka sebagai musuh secara resmi. Ketegangan politik dan dipomatik memang terjadi pada masa-masa tersebut, namun tidak sampai membuat Indonesia mendeklarasikan mereka sebagai musuh lalu mengibarkan permusuhan diplomatik yang berkepanjangan. Tensi politik dan diplomatik antara negara ini dipandang cukup cepat mengalami normalisasi pasca bersitegang karena beberapa masalah tersebut.

Jika dihadapkan dengan pandangan dalam Arthashastra terkait posisi negara yang bertetangga pada konstelasi teori mandala, sesungguhnya Indonesia telah menetapkan konstelasi mandala yang unik. Hal ini bukan hanya karena Indonesia berupaya menempatkan negara-negara tetangganya pada posisi *mitrabhavin* (bersahabat) bukan *aribhavin* (bermusuhan). Namun juga karena jargon politik luar negeri *Zero Enemy Thousand Friends* secara tidak langsung telah meniadakan posisi “musuh” dalam konstelasi geopolitik mandala Indonesia. Deklarasi dan juga

---

<sup>118</sup> Indonesia sempat bersitegang dengan Malaysia terkait dengan blok Ambalat, klaim beberapa kebudayaan Indonesia oleh Malaysia, sengketa perbatasan di Kalimantan, dan lain sebagainya.

<sup>119</sup> Indonesia sempat bersitegang dengan Australia terkait hukuman mati yang diberikan kepada WN Australia yang membawa Narkoba ke Indonesia, dan juga terkait dengan penyadapan yang dilakukan oleh Australia terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhono dan kerabatnya.

penerapan kebijakan di era pemerintahan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono secara tidak langsung juga telah meletakkan dasar-dasar idealis dalam hubungan antar negara. Sekaligus juga menciptakan jalan bagi Indonesia untuk membentuk mandala negara netral yang membangun konstelasi bukan berdasarkan kawan dan lawan, namun sebagai mitra dan mitra (antar kawan) yang berjuang bersama demi tercapainya kepentingan bersama.

Keadaan ini sesungguhnya memberikan insight yang positif bagi Indonesia. Jargon politik luar negeri *Zero Enemy Thousand Friends* dapat dipandang sebagai upaya "*trust building*" dengan negara-negara lain. Jika dianalisa lebih jauh sesungguhnya ini merupakan bentuk Grand Strategi yang bersumber dari Kebijakan Politik Luar Negeri Bebas-Aktif untuk menghalau ancaman dari negara luar (ancaman eksternal). Menggalang musuh alamiah dan potensial untuk menjadi mitra atau kawan merupakan cara cerdas untuk meminimalisir bahkan meniadakan ancaman. Indonesia menjadikan negara tetangga yang berbatasan langsung dengannya sebagai mitra utama dalam berbagai kerjasama, baik dalam bentuk ekonomi, sosial, budaya maupun pertahanan dan keamanan. Dengan demikian negara-negara tetangga yang berbatasan langsung ini memiliki *common interest* di Indonesia yang perlu dijaga bersama. *Common interest* ini memberikan *side-effect* di mana ketika potensi ancaman muncul dari negara tetangga yang berbatasan langsung dengan Indonesia, negara-negara itu akan mempertimbangkan kembali tindakannya. Hal tersebut terjadi karena tindakan negara-negara ini dapat berdampak negatif terhadap *common interest* yang telah dibangun. Selain itu prinsip resiprokal (timbang-balik) dalam norma hubungan antar negara di dunia internasional, membuat sebuah negara selayaknya memperlakukan negara lain sebagaimana ia diperlakukan. Dengan demikian ketika Indonesia memperlakukan negara lain sebagai kawan, bukan sebagai lawan, maka bentuk resiprokal yang negara tersebut lakukan adalah memperlakukan Indonesia sebagai kawan pula.

Hal yang kemudian juga perlu dikritisi dari pola penetapan ancaman pada Arthashastra adalah keberadaan ancaman yang terlalu menitik-beratkan pada sifat-sifat ancaman yang militeristik, sehingga hanya terkooptasi pada ancaman yang bersifat tradisional semata. Hal ini tercermin dari statemen dalam sutra-sutra pada Arthashastra yang membahas dengan begitu detail apa yang harus dilakukan jika musuh menyerang negara, dan bagaimana jika musuh melakukan operasi intelijen. Sifat ancaman yang tradisional ini pun disikapi dengan cara-cara yang juga tradisional atau militeristik sehingga strategi berperang, strategi menipu lawan, strategi melemahkan tentara lawan, bagaimana memperkuat militer dan Alutsista, bagaimana mendapatkan power yang lebih besar, merupakan berbagai permasalahan yang berusaha dicarikan solusi oleh Chanakya dalam Arthashastra.

Sifat atau *nature* ancaman yang bersifat *military oriented* ini tentu akan sedikit berselisih dengan pemahaman modern di mana *nature* ancaman tidak lagi hanya bersifat *military oriented* atau tradisional, namun juga non tradisional, sebagaimana diungkapkan oleh Perwita (2006: 124-5) bahwa konsep ancaman telah berkembang tidak lagi hanya *military oriented* namun juga ancaman nir-militer, ancaman non-tradisional yang mencakup berbagai aspek seperti ideologi, ekonomi, politik sosial dan budaya, serta pertahanan dan keamanan (ipoleksosbudhankam).<sup>120</sup> Maka dari itu untuk memahami kesenjangan yang nampak dari keadaan ini teori asimilasi horizon dan lingkaran hermeneutik oleh Hans-Georg Gadamer (dalam Susanto, 2016) dapat dipergunakan.

Gadamer menyatakan bahwa dalam proses penafsiran seseorang harus sadar bahwa ada dua horizon yakni (1) cakrawala (pengetahuan) atau horizon dalam teks dan (2) cakrawala (pemahaman) atau horizon pembaca. Di mana seorang pembaca teks memulai pemahamannya melalui cakrawala hermeneutiknya, namun dia juga harus memperhatikan bahwa teks juga mempunyai horizonnya sendiri yang mungkin saja berbeda dengan horizon yang dimiliki pembaca. Sehingga dengan kata lain pembaca harus

---

<sup>120</sup> Banyu Perwita *Op.cit*, hlm 123-125

memperhatikan horizon historis, di mana sebuah teks itu muncul, diungkapkan atau ditulis. Interaksi antar kedua horizon ini yang disebut sebagai “lingkaran hermeneutik”. Lebih lanjut, horizon pembaca hanya berperan sebagai titik pijak seseorang dalam memahami teks, yang dapat berupa “pendapat” ataupun kemungkinan” bahwa teks ini berbicara mengenai suatu hal. Namun yang perlu ditegaskan adalah titik pijak ini tidak boleh dibiarkan memaksa pembaca agar teks harus berbicara sesuai dengan titik pijaknya. Justru sebaliknya, titik pijak pembaca ini harus bisa membantu memahami apa yang sebenarnya dimaksudkan oleh teks. Sehingga terbentuk sebuah pertemuan antara subjektivitas pembaca dan objektivitas teks, di mana makna objektivitas teks lebih diutamakan.<sup>121</sup>

Kesenjangan pemahaman mengenai *nature of threat* terlihat ketika pemahaman modern membagi sifat ancaman yakni ancaman tradisional (*military oriented*) dan non tradisional (ipoleksosbudhankam), sementara teks Arthashastra lebih menitik-beratkan kepada *nature of threat* yang bersifat militeristik. Untuk memahami hal tersebut kita harus melihat cakrawala historis saat teks Arthashastra disusun oleh Chanakya. Dengan demikian, kita dapat memahami bahwa sifat ancaman yang militeristik disebabkan karena cakrawala historis dari Chanakya saat itu di mana hal-hal non militer memang belum teralu dipandang sebagai sebuah ancaman yang krusial bagi kerajaan. Selain itu sangat kecil kemungkinannya pada saat itu bila ancaman non militer berasal dari eksternal atau luar negara. Maka dari itu, upaya untuk menghalau ancamannya pun menjadi *military heavy*, hal ini berdampak pada *military expenditure* kerajaan Maurya yang sangat besar. Kerajaan Maurya saat itu menjadi salah satu negara dengan kekuatan militer terkuat yang bahkan mampu menghalau invasi *The Great Alexander* dari Yunani.<sup>122</sup>

Keadaan pandangan Chanakya dalam Arthashastra yang terlalu *militaristic oriented* inilah yang kemudian membuat Arthashastra tidak bisa serta-merta diaplikasikan dalam strategi diplomasi pertahanan masa kini.

<sup>121</sup> Susanto, 2016. *Op.cit.* hlm 53-4

<sup>122</sup> Radha Kumud Mookerji, *Chandragupta Maurya and His Times*. (New Delhi: Motilal Banarsidass Publishers Pltd., 1999) hlm. 65-9

Karena saat ini ancaman telah terproliferasi sedemikian luas. Ancaman tidak lagi bersifat tradisional atau militeristik semata, namun telah berkembang menjadi ancaman non-tradisional pula. Ancaman non-tradisional meliputi ancaman *cyber*, *transnational organized crime*, narkoba, terorisme, bencana alam wabah penyakit, dan lain sebagainya. Memang benar bahwa dalam bab kedelapan Arthashastra Chanakya menjabarkan penanganan mengatasi bencana seperti kekeringan, wabah penyakit dan bahkan dalam bab keempatbelas menjabarkan mengenai penggunaan senjata kimia seperti racun dan ilmu hitam untuk mengalahkan musuh, tetap saja cara-cara tersebut dipandang belum mampu membawa Arthashastra untuk menghadapi masalah-masalah non-tradisional/non militer yang berkembang saat modern ini. Dengan demikian, ketika ingin mengaplikasikan Arthashastra saat ini, diperlukan penyesuaian-penyesuaian tertentu, terutama terkait dengan strategi menghadapi ancaman non militer/non tradisional.

Dalam Arthashastra karya Chanakya rakyat diposisikan sebagai subjek yang dilindungi dan tidak terlibat secara langsung dalam pertahanan negara. Karena pertahanan negara menjadi tanggung jawab para *ksatria varna*<sup>123</sup>. Keadaan ini menjadi berbeda jika dibandingkan dengan sistem pertahanan yang dilaksanakan di Indonesia yang mengikutsertakan rakyat. Indonesia melalui sistem pertahanan rakyat semesta, tidak menjadikan rakyat hanya sebagai subjek yang dilindungi dan tidak terlibat secara langsung dalam pertahanan negara. Di Indonesia pertahanan dan keamanan negara secara *de facto* dan *de jure* menjadi

---

<sup>123</sup> Pada zaman dinasti Maurya terdapat sebuah sistem sosial yang membagi masyarakat ke dalam empat kelompok masyarakat/*catur varna*. Pertama adalah Brahmana, yaitu para pendeta, guru, penasehat kerajaan, dan para filsuf (mereka yang menjalankan kewajibannya menjaga masyarakat melalui ilmu pengetahuan). Kedua adalah Ksatria, yaitu para tentara, administrator negara, diplomat, intelijen, politisi (mereka yang menjalankan kewajibannya menjaga masyarakat melalui kekuatan, kecerdasan dan keberanian). Ketiga adalah Vaisya adalah para pedagang (mereka yang menjalankan kewajiban menjaga masyarakat melalui kecerdasan dan kemampuan menjalankan perekonomian negara). Keempat adalah Sudra adalah para pekerja/buruh (orang-orang yang memiliki kekuatan fisik tetapi tidak memiliki kapabilitas tiga kelompok masyarakat lainnya, sehingga bertugas untuk membantu mereka).

tanggung jawab Tentara Nasional Indonesia serta aparat keamanan. Dalam Sistem pertahanan rakyat semesta, rakyat juga diposisikan sebagai bagian dari komponen cadangan dan komponen pendukung pertahanan negara. Walaupun RUU yang mengatur mengenai komponen cadangan dan komponen pendukung ini belum disahkan, tetapi posisi rakyat yang memiliki hak dan kewajiban dalam pertahanan dan keamanan negara telah diatur dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat 3 yang menyebutkan bahwa "*setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara*". Demikian pula dengan Pasal 30 ayat 1 UUD 1945, yang menyatakan bahwa "*tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pertahanan dan keamanan Negara*". Keadaan ini sesungguhnya membuat secara teoretis sistem pertahanan negara Indonesia menjadi lebih holistik jika dibandingkan dengan sistem pertahanan yang tergambar dalam Pustaka Arthashastra.

Dalam pemetaan ancaman secara teoretis Indonesia juga terlihat lebih holistic. Sistem pemetaan ancaman sebagaimana dijabarkan dalam buku putih pertahanan terbagi menjadi ancaman nyata dan ancaman belum nyata. Ancaman nyata merujuk pada bentuk ancaman yang menjadi prioritas dalam penanganannya, meliputi terorisme dan radikalisme, bencana alam, separatism, pemberontakan bersejata, pencurian kekayaan alam, pelanggaran wilayah perbatasan, wabah penyakit, serangan siber dan spionase, perompakan dan juga penyalahgunaan narkoba. Ancaman belum nyata merujuk pada ancaman berupa konflik terbuka atau perang konvensional yang menghadapkan kekuatan angkatan bersenjata negara-negara yang berkonflik<sup>124</sup>.

Hal ini disebabkan karena sistem pemetaan ancaman yang ada di Indonesia telah memadukan nature ancaman yang bersifat tradisional dan juga tradisional. Ketika dihadapkan dengan konsep pemetaan ancaman yang terdapat di dalam buku putih pertahanan Indonesia, maka dapat di

---

<sup>124</sup> Buku Putih Pertahanan Negara, hlm. 22-23

terlihat perbedaan yang mencolok karena perbedaan situasi lingkungan strategis yang dihadapi Indonesia dan juga di hadapi oleh Kerajaan Maurya. Pada masa Dinasti Chandragupta, Kerajaan Maurya invasi dari negara lain dan perang konvensional merupakan sebuah ancaman nyata yang dapat terjadi kapan saja. Sementara bentuk lain seperti bencana alam, pemberontakan senjata, wabah penyakit memang di bahas sebagai salah satu ancaman domestic yang dapat membahayakan kerajaan, namun tidak mendapatkan prioritas yang terlalu besar. Hal ini terlihat dari bagaimana Arthashastra karya Chanakya lebih rinci dan detail dalam membahas berbagai strategi untuk mencegah ancaman dari luar dan strategi perang melawan negara-negara lainnya.

Namun terlepas dari hal itu, konsep Mandala sesungguhnya sangat dapat dijadikan dasar strategi pada diplomasi pertahanan. Konstelasi geopolitik negara dalam teori mandala mengharuskan sebuah negara mengidentifikasi mana negara yang dapat menjadi musuh alami, musuh potensial, sekutu dekat, ataupun sekutu jauh. Negara mana yang dapat memenuhi syarat sebagai *mitra* (rekan kerja/sekutu), negara mana yang berpotensi untuk berselisih pendapat dalam sebuah isu. Dengan demikian negara dapat melihat secara holistik negara mana yang perlu di-*lobby* lebih keras karena posisinya akan bersebrangan dan negara mana yang sudah bisa dipastikan akan berada dipihaknya. Mandala ini membuat negara melihat peta kekuatan geopolitiknya dalam memenangkan sebuah isu yang berkaitan dengan upaya mencapai kepentingan nasional negaranya.

Misalkan Indonesia melihat bahwa ketegangan di Laut Cina Selatan dapat berdampak pada keamanan regional serta tensi politik di wilayah ASEAN, maka diperlukan sebuah formula untuk menurunkan tensi politik di *dispute area* tersebut. Masalah lain adalah ketiadaan otoritas yang bertanggung jawab jika terjadi permasalahan kemanusiaan di *dispute area* tersebut. Maka kemudian Indonesia mengajukan gagasan mengenai operasi bantuan kemanusiaan dan bantuan bencana (*Humanitarian*

*Assistance and Dissaster Relief*) di wilayah *dispute area* yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di wilayah Laut Cina Selatan.

Mandala teori di sini berfungsi untuk mengetahui negara mana saja yang akan resisten terhadap isu ini, dan negara mana yang akan setuju dengan dilaksanakannya isu ini. Kemudian setelah terpetakan, Indonesia harus menggunakan *lobbying* yang lebih gencar terhadap negara-negara yang dinilai akan resisten terhadap isu ini. Ketika telah yakin lebih dari tiga perempat pemangku kepentingan setuju dengan isu ini<sup>125</sup>, maka pertemuan yang membahas isu operasi terkait *humanitarian assistance and disaster relief* di Laut Cina Selatan dapat dijalankan.

Terdapat nilai positif dari Pustaka Arthashastra karya Chanakya dengan pendekatan pemetaan ancaman yang militeristik. Nilai tersebut adalah kewaspadaan dan upaya negara untuk selalu menempatkan militer mereka dalam keadaan yang prima. Terlihat dari *expenditure* negara dalam militer yang tinggi. Negara mengupayakan para tentaranya hidup berkecukupan, dan mengupayakan mereka memperoleh pelatihan yang menambah kemampuan dan kapabilitas yang dibutuhkan. Negara memberikan porsi keuangan untuk mewujudkan alutsista yang terbaik dan terbaru. Negara memiliki konsern yang tinggi terhadap perlindungan informasi negara dan juga jaringan intelejen melalui telik sandi serta agen-agen yang loyal terhadap negara. Pembangunan *hard power* dan *soft power* negara sehingga akumulasi *power* yang dimiliki oleh negara dapat memberikan efek daya tangkal terhadap negara, di mana negara lain menjadi segan atau bahkan takut untuk melakukan serangan terhadap sang *Vijigṣu*<sup>126</sup>.

Namun yang perlu dikritisi adalah konsep pemetaan ancaman dalam Arthashastra dipandang masih terlalu militeristik. Hakikat ancaman terhadap negara masih bersifat tradisional. Keadaan ini perlu

<sup>125</sup> Kemungkinan memenangkan perundingan diatas 75-80-%

<sup>126</sup> Ashvini Agrawal, *Rise and Fall of the Imperial Guptas*, (Delhi: Motilal Banarsidass Publisher Pltd., 1989), hlm. 142

dikembangkan dengan mengikutsertakan pemetaan ancaman non-tradisional. Dengan demikian, bisa didapatkan sebuah pemetaan ancaman yang lebih holistik.

#### **4.2.2 Konsep Tata Pemerintahan (*Statecraft*) dalam Arthashastra Sebagai Dasar Strategi Diplomasi Pertahanan.**

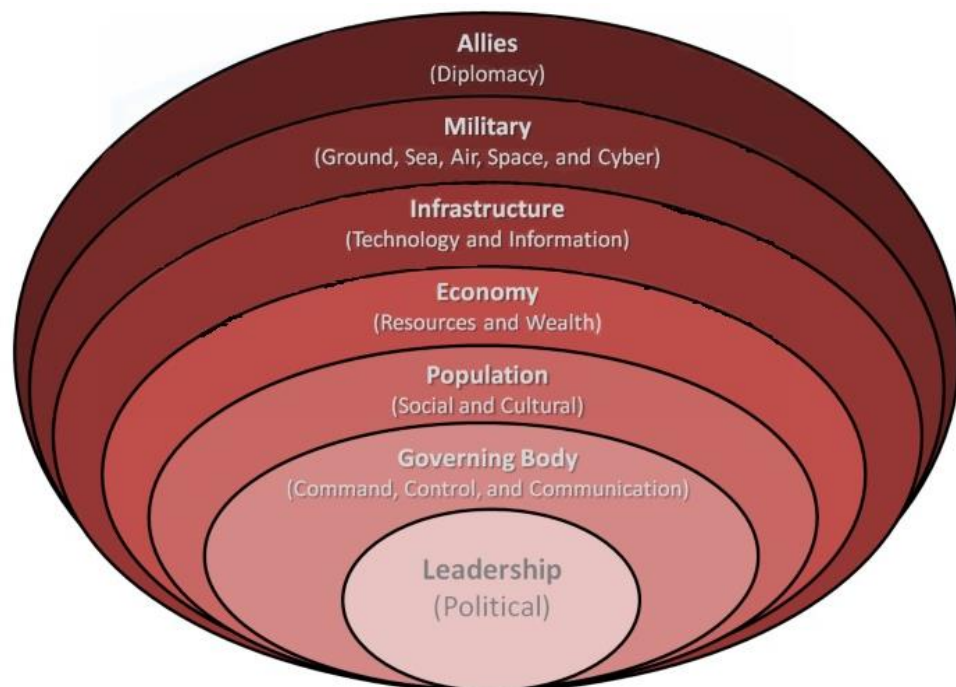
Teori *Saptanga* dalam Arthashastra menjelaskan bahwa terdapat tujuh elemen yang diperlukan oleh negara untuk menjadi negara yang kuat yakni pertama pemimpin yang memiliki kualifikasi sifat *astabrata*; kedua, penasehat raja/menteri/anggota dewan; ketiga, teritori, populasi, sumber daya alam; keempat, ibu kota yang dibentengi; kelima, perbendaharaan, perekonomian negara; keenam angkatan bersenjata/tentara; dan ketujuh adalah sekutu. Sebagian besar elemen ini masih relevan hingga saat ini, namun ada satu elemen yang perlu diinterpretasikan kembali seiring dengan perkembangan zaman, dan teknologi, yakni *Durga* atau ibu kota yang dibentengi.

Dalam upaya memberikan penafsiran terhadap suatu teks, Hans-Georg Gadamer mengemukakan sebuah teori yang disebut sebagai Teori Penerapan (*Application*). Menurut Gadamer, seorang pembaca disamping harus memahami dan menafsirkan teks, ada satu hal lagi yang dituntut, yakni “penerapan” atau (*anwendung*) dari pesan-pesan ataupun ajaran ajaeen pada masa ketika teks tersebut ditafsirkan. Menurut Gadamer, pesan yang harus ditafsirkan pada masa penafsir bukanlah makna literal atau harfiah dari teks tersebut. Melainkan lebih kepada *meaningful sense* atau makna yang berarti, ataupun pesan yang lebih berarti dari sekadar makna literal teks.<sup>127</sup> Dengan demikian dalam upaya memahami kembali dan membawa teori saptanga Arthashastra pada konteks kekinian diperlukan upaya penerapan *meaningful sense* dari masing-masing elemen pembentuk saptanga itu sendiri.

---

<sup>127</sup> Edi Susanto, *Op. cit.* hlm. 54-55.

Interpretasi ulang terhadap *saptanga* dilakukan oleh Wing Commander Vinay Vittal dalam tesisnya yang berjudul “*Arthashastra: A Timeless Grand Strategy*”. Menurut Vittal ketujuh elemen ini memberikan framework dengan signifikansi yang sangat penting. Menurut Chanakya Power yang diperlukan oleh sebuah negara dalam mengembangkan interestnya itu berlawanan dengan negara lain tergantung dari seberapa dekat dengan konstituen idealnya. Oleh karena itu, sebelum memulai melakukan operasi militer, adalah penting untuk memanfaatkan perbedaan kekuatan dari sekutunya dan disaat yang bersamaan melemahkan lawan. Oleh karena itu, strategi besar dan baik harus memasukan instrumen *saptanga* ke dalam kekuasaan nasional seperti politik, ekonomi, militer, sosial, informasi dan diplomatik.



Gambar 4.8 Elemen pembentuk Kekuatan Nasional pada Grand Strategy  
Sumber: Vittal 2011

Dalam Gambar 4.8 mengenai pembentukan Kekuatan Nasional pada Grand Strategi di atas, kita lihat bahwa enam dari tujuh interpretasi *saptanga* yang dikemukakan oleh Chanakya tidak mengalami perubahan

berarti dan hanya diberikan penajaman dalam fokus kekiniannya. *Swami* dimaknai sebagai kepemimpinan utamanya dalam hal politik. Sebuah negara yang kuat layaknya memiliki pemimpin dengan kualitas *astabrata*, mampu memaksimalkan *soft power* dan juga *hard power* dari negaranya dan mengejawantahkannya menjadi *smart power*.

*Amatya* dimaknai tidak hanya sebagai *councilor* (penasehat) atau *minister* (menteri) tapi lebih kepada *governing body* yang memiliki kuasa atas komando, kontrol dan komunikasi negara. Dengan kata lain, negara yang kuat juga harus memiliki pemerintahan yang bersih, jujur, tidak korup, professional, akuntable, dan peduli terhadap rakyat.

*Janapada* tidak hanya dimaknai sebagai teritori dan populasi namun juga berfokus kepada sosial-budaya. Sebuah negara yang kuat harus memiliki rakyat yang sejahtera, melek politik, taat pada peraturan, beradab, dan senantiasa membantu mengkritisi pemerintah terhadap kebijakan-kebijakan yang tidak memberikan dampak positif terhadap negara dan rakyat. Mampu menjaga identitas dan akar budayanya. Memiliki kohesi sosial yang baik, rasa kebangsaan, nasionalisme dan patriotisme terhadap kemajuan negara.

*Durga* tidak hanya dimaknai sebagai ibu kota yang dibentengi, namun lebih kepada infrastruktur negara, utamanya teknologi dan informasi. Infrastruktur baik fisik maupun digital menjadi hal yang krusial saat ini. Kemajuan sebuah negara saat ini salah satunya berdasar dari bagaimana infrastruktur di negara tersebut dapat menunjang kehidupan masyarakatnya baik dari segi sosial-budaya maupun perekonomian. Infrastruktur yang baik dapat meningkatkan interkonektivitas antar wilayah yang kemudian dapat berujung pada upaya saling menguatkan antar wilayah dalam negara. Sementara infrastruktur teknologi dan informasi merupakan hal mutlak diperlukan sebuah negara saat ini. Globalisasi dan revolusi industry 4.0 telah menciptakan *disruption* tersendiri di tengah masyarakat dunia. Hal ini memberikan pengaruh terhadap perkembangan perekonomian sebuah negara.

*Kosa* bukan hanya berarti perbendaharaan negara, namun juga perekonomian, utamanya kekayaan negara dan sumber daya yang dimiliki negara. Perbendaharaan negara menjadi hal yang penting. Bagaimana negara mengatur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) nya, keseimbangan neraca perdagangan, pendapatan negara akan sangat mempengaruhi kesejahteraan dan kekuatan ekonomi sebuah negara. Sudah menjadi kepastian umum, bahwa negara dengan leverage ekonomi yang tinggi akan memiliki kekuasaan/power yang lebih tinggi pula dalam percaturan politik internasional dan hubungan antar negara. Negara juga harus mampu mengidentifikasi sumber daya yang dimilikinya. Kekayaan negara baik dalam bentuk sumber daya alam hayati maupun mineral tambang, harus dapat diidentifikasi dan juga dimanfaatkan secara bijaksana sehingga keberlangsungan atau *sustainability*-nya terjaga.

*Danda* tidak hanya dimaknai sebagai militer/angkatan bersenjata saja namun juga upaya militer melindungi kedaulatan darat, laut, udara, angkasa dan *cyber* nya. Negara yang kuat harus memiliki militer yang handal yang mampu melindungi keutuhan dan kedaulatan negaranya baik di darat, laut udara dan bahkan dari ancaman *cyber* sekalipun.

Sementara *Mitra* dimaknai sebagai sekutu yang memfokuskan pada kemampuan diplomasi sebuah negara di dalamnya. Bagaimana negara dapat memainkan diplomasinya untuk memperkuat hubungan dengan negara-negara lain, menjalin hubungan baru dan memanfaatkan power yang diperoleh melalui modal sosial (pertemanan dengan negara lain) untuk mencapai kepentingan negaranya.

Seiring dengan kemajuan teknologi, maka yang perlu dicermati dari pemaknaan ketujuh elemen ini adalah fokus mereka terhadap hal-hal baru yang muncul bersamaan dengan perkembangan teknologi informasi, seperti misalnya pemaknaan pada ibukota yang dibentengi. Pada zaman kerajaan, pusat data dan pemerintahan berada di ibukota sehingga keberadaan benteng menjadi sangat krusial sebagai bagian dari pertahanan. Namun konteks zaman sekarang benteng yang diperlukan

tidak hanya berbentuk fisik lagi, terlebih karena keberadaan data-data negara dengan adanya teknologi digital, tidak lagi hanya disimpan dalam bentuk fisik (data di atas kertas) saja, namun juga dalam bentuk data digital. Data-data digital inilah yang kemudian perlu dijadikan *concern* oleh pemerintah pula. Karena tidak dapat dipungkiri kejahatan siber (pencurian data-data pemerintah, penyalahgunaan data masyarakat, *hacking*, *malware*, virus, dll) kian hari menjadi sebuah ancaman yang nyata dihadapi oleh berbagai negara, termasuk Indonesia. Benteng siber untuk menjamin kerahasiaan data dan sistem keamanan teknologi digital serta informasi negara menjadi sebuah kebutuhan yang mendesak untuk segera dibentuk dan dijalankan. Contoh nyata adalah serangan *cyber ransomware* “*wanna cry*” yang menginfeksi lebih dari 75.000 komputer di lebih dari 99 negara pada bulan Mei 2017 para *hacker* yang menamai diri *The Shadow Brokers* meretas ribuan sistem komputer di dunia, mengenkripsi file dalam komputer dan meminta sejumlah uang tebusan untuk dapat mengembalikan komputer tersebut pada keadaan semula.<sup>128</sup> Di Indonesia, *ransomware* *wanna cry* ini menginfeksi sejumlah komputer di berbagai rumah sakit umum pemerintah dan meminta uang tebusan sebesar Rp. 4.000.000 untuk mengembalikan komputer ke keadaan sediakala.<sup>129</sup> Benteng pertahanan siber ini harus terkoordinasi secara komprehensif antara satu kementerian dan lembaga lainnya.

Menurut Abhisek Kumar (2003: 68) Teori Saptanga, atau elemen pembentuk negara ini sesungguhnya memiliki kesamaan dengan konsep kontemporer mengenai dimensi internal dari kekuasaan nasional (sebagaimana terlihat pada tabel 4.2 Teori Statecraft dan kekuatan nasional menurut pandangan Chanakya dalam Arthasahstra dengan konsep

---

<sup>128</sup> Joseph Cox, "A Massive Ransomware 'Explosion' Is Hitting Targets All Over the World". *Motherboard* dalam [https://motherboard.vice.com/en\\_us/article/a-massive-ransomware-explosion-is-hitting-targets-all-over-the-world](https://motherboard.vice.com/en_us/article/a-massive-ransomware-explosion-is-hitting-targets-all-over-the-world). (2017-05-12). diakses pada 20 November 2018

<sup>129</sup> Selena Larson, "Massive ransomware attack hits 99 countries". *CNN*. dalam <http://money.cnn.com/2017/05/12/technology/ransomware-attack-nsa-microsoft/>, (2017-05-12), diakses pada 20 November 2018

*western*. Dari perspektif negara modern (kolom tabel kedua) kita dapat menghubungkan masing-masing elemen yang dikemukakan Chanakya dengan variabel esensial dari kekuatan nasional kontemporer.

**Tabel 4.2 Perbandingan Teori Statecraft Dan Kekuatan Nasional Menurut Pandangan Chanakya Dalam Arthasahstra Dengan Konsep Barat**

<b><i>Prakrti</i> atau elemen pembentuk negara berdasarkan teori <i>saptanga</i></b>	<b>Elemen pembentuk negara menurut Chanakya dalam perspektif negara modern</b>	<b>Model kekuatan nasional berdasarkan Teori Transisi Kekuatan</b>	<b>Model kekuatan nasional berdasarkan Tellis <i>et al</i></b>
<i>Swami</i> – Pemimpin negara	Kepemimpinan Politik	Kemampuan politik (dampak jangka pendek pada perubahan kekuatan nasional)	Sumber daya nasional : - Teknologi - Perusahaan - Sumber daya manusia - Sumber daya modal/ keuangan - Sumber daya fisik
<i>Amatya</i> – Dewan Menteri atau pejabat negara	Legislative dan birokrasi		
<i>Janapada</i> – wilayah dan populasi	Sumber daya nasional	Produktivitas ekonomi penduduk (dampak jangka menengah pada perubahan kekuatan nasional)	Kinerja Nasional - Kendala Eksternal - Kapasitas infrastruktur - Sumber daya ideasional
<i>Durga</i> – kota yang dibentengi	Pertahanan negara dan sumber daya perkotaan		
<i>Kosha</i> – Perbendaharaan	Sumber daya ekonomi		
<i>Danda</i> – angkatan bersenjata	Militer	Populasi (dampak jangka panjang pada perubahan kekuatan nasional)	Kapabilitas Nasional - Sumber daya strategi dan kemampuan konversi = kemampuan tempur
<i>Mitra</i> – Sekutu	Sekutu		

sumber: Kumar, Abhisek (2003)

Lebih lanjut, jika kita berupaya melihat persamaan dari tabel ini, baik model yang digambarkan oleh Chanakya ataupun model dari Tellis *et al*, keduanya mendiskusikan bahwa sumber daya nasional dan juga kemampuan militer menjadi kontributor utama kekuatan nasional. Ketiga model ini melihat keterkaitan antara berbagai elemen pembentuk negara.

Selain itu, teori Saptanga merujuk pada power negara yang tidak lagi abstrak, besarnya relatif namun merupakan keseluruhan dari variabel yang material maupun immaterial.<sup>130</sup> Bersamaan dengan hal tersebut, power dari negara bisa dievaluasi dan diperkirakan secara memadai. Termasuk di dalamnya penilaian tren perkebangan baik positif atau negatif dari ketujuh elemen tersebut. Apakah mengalami penurunan, kenaikan atau justru mengalami stagnasi.<sup>131</sup> Merujuk pada pemahaman *statecraft* sebagaimana disampaikan oleh Dr. John Lenczowski, bahwa *statecraft* merupakan seni dalam menggunakan instrumen kekuatan nasional untuk mencapai tujuan membela kepentingan nasional yang vital, melancarkan Hubungan Internasional dan akhirnya menjadi penyebab perdamaian di dunia.<sup>132</sup> Jika merujuk pada teori ini maka ketujuh elemen dalam *saptanga* ini merupakan bagian integral dalam seni memerintah pada zaman kerajaan Maurya. Di mana *saptanga* ini di akumulasikan dan digunakan untuk mencapai *yogakshema* (kesejahteraan, keamanan, dan kebahagiaan rakyat).

Konsep dari Chanakya, sebagaimana telah dijelaskan di atas, mengenai kekuatan negara sebagai keseluruhan dari ketujuh elemen pembentuk negara, secara teoretis homolog dengan konsep kekuatan nasional dari Morgenthau. Morgenthau mengukur kekuatan negara melalui populasi, sumber daya alam (bahan mentah), pertanian, potensi industri dan kekuatan bersenjata negara. Morgenthau juga memasukkan faktor

---

<sup>130</sup> Michael Liebig, "Kautilya's Relevance for India Today", *India Quarterly* volume 69 Number 2, 2013, hlm.99-116

<sup>131</sup> Kangle, RP. *Kautilya Arthashastra* (Part II). (New Delhi: Motilal Banarsidass, 1992) Note 1, hlm.884 (buku 7. Bab 18. Ayat 43)

<sup>132</sup> Toby S. James, "Neo-Statecraft Theory, Historical Institutionalism and Institutional Change", *University of East Anglia*. 2016. Dalam [https://ueaeprints.uea.ac.uk/54729/1/James\\_GOV\\_for\\_web.pdf](https://ueaeprints.uea.ac.uk/54729/1/James_GOV_for_web.pdf). diakses pada 18 Desember 2018

immaterial seperti karakter nasional, moralitas nasional, dan kualitas dari pemerintah serta diplomasi.<sup>133</sup>

Bentuk *statecraft* dalam pandangan Chanakya terlihat tidak jauh berbeda jika disandingkan dengan konsep trias politika. Dalam trias politika kekuasaan dipisahkan kedalam tiga lembaga berbeda, yakni kekuasaan legislatif, eksekutif dan juga yudikatif<sup>134</sup>. Bentuk trias politika ini tercermin dalam pustaka Arthashastra karya Chanakya. Kekuasaan legislative merujuk pada elemen *amatya* atau para Menteri yang memberikan nasehat dan membantu terkait pengaturan negara. Kekuasaan eksekutif merujuk pada elemen *swami* atau pemimpin negara. Sedangkan kekuasaan yudikatif dijalankan berdasarkan empat dasar hukum berupa *dharma* (*established law* atau hukum yang berlaku), *Charita* (*customary law* atau hukum adat), *Rajasasana* (*edicts, announced law* atau maklumat, hukum yang diumumkan, bisa berbentuk titah raja), *vyavahara* (*evidence, conduct* atau kesaksian, perilaku)<sup>135</sup>. Praktik penegakkan hukum ini dijalankan oleh setiap pengadilan dengan tiga *Pradeshtri* (*magistrate* atau hakim setingkat menteri)<sup>136</sup>.

Perbedaan dengan sistem tata negara yang sekarang adalah kekuasaan raja lebih luas daripada pemimpin negara dalam sistem presidensial. Para menteri atau *amatya* berperan untuk membantu menjalankan tata pemerintahan dan memberikan nasehat terhadap keputusan yang akan diambil oleh Raja atau pemimpin negara. Namun keputusan tertinggi ada pada raja, dan raja berhak memberikan titah atau keputusan yang kemudian berfungsi sebagai hukum mengikat yang berlaku pada seluruh warga kerajaan. Sementara para *amatya* atau menteri tidak

---

<sup>133</sup> Hans J. Morgenthau, *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace*, (New York: Alfred A. Knopf. 1978) hlm. 107-170

<sup>134</sup> Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2008) hlm.53

<sup>135</sup> Arthashastra, 3.1. 39-40

<sup>136</sup> Arthashastra 3.1.1

dalam posisi dapat menganulir keputusan yang dibuat oleh raja<sup>137</sup>. Hal ini yang menjadi perbedaan dengan sistem trias politika modern saat ini, dimana kekuasaan antara tiga badan bersifat sama rata bukan hirarki, sehingga legislatif memiliki wewenang untuk menganulir keputusan yang telah diambil oleh eksekutif, jika kebijakan tersebut tidak tepat dan merugikan rakyat banyak.

*Saptanga* teori yang dikemukakan oleh Chanakya ini dapat menjadi sebuah bagian integral yang penting dalam strategi diplomasi pertahanan. hal ini disebabkan karena elemen dalam *saptanga* dapat terukur secara agregat sebagai sebuah kekuatan negara. Maka dari itu, hal ini tentu dapat dijadikan alat teoretis yang baik untuk analisis intelijen yang dibutuhkan untuk memperoleh informasi yang lebih komprehensif mengenai lawan ataupun kawan yang akan diajak bekerja sama dalam kerangka diplomasi pertahanan sebuah negara.

Penilaian intelijen terhadap kapabilitas negara dapat didasarkan pada kriteria substantif dan obyektif. Kekuatan negara ditentukan oleh totalitas dan konektivitas dari tujuh elemen (*prakrtis*). Ketika kita melihat potensi kekuatan negara, kita dapat menemukan bahwa faktor kekuatan militer negara ini tampaknya sangat kuat: angkatan bersenjata secara kuantitatif besar. Tetapi analisis intelijen dapat mengungkap bahwa negara yang sama ini agak lemah dalam kekuatan ekonomi dan sumber daya keuangan yang diterjemahkan ke dalam gaji yang hilang, peralatan kelas rendah dan persediaan yang tidak mencukupi<sup>138</sup> — menghalangi kekuatan tempur tentara.

Sebaliknya, negara kecil yang secara teritorial dan demografis dengan angkatan bersenjata yang sederhana dapat menjadi negara yang kuat dalam rentang waktu yang relatif singkat. Itu bisa terjadi jika faktor negara *swami* dan *amatya* memiliki kualitas yang sangat baik, yang berarti

---

<sup>137</sup> Thomas R. Trautmann, *Arthashastra: The Science of Wealth*, (India: Penguin Books, 2012) hlm. 134-9

<sup>138</sup> Persediaan alutsista

mempromosikan dan memperluas ekonomi di pedesaan (*janapada*) dan di kota (*durga*) sehingga meningkatkan pendapatan pajak (*kosa*) yang memungkinkan angkatan bersenjata untuk ditingkatkan (*danda*) dan melakukan kebijakan luar negeri yang bijaksana (*amatya*).<sup>139</sup>

Jika kemudian diarahkan dalam aplikasi Strategi Diplomasi Pertahanan elemen dalam saptanga ini merupakan variabel data yang dapat digunakan sebagai data awal sekaligus bahan pertimbangan dalam pembuatan strategi ataupun kebijakan diplomasi pertahanan sebuah negara. Hasil penilaian dan analisis dari intelijen terkait elemen saptanga negara dapat menjadi bahan pertimbangan sebelum memutuskan jenis/bentuk kerjasama yang akan dilakukan serta cara pendekatan dalam negosiasi agar kerjasama membawa *mutual benefit* bagi kedua belah pihak.

#### **4.2.3 Konsep Diplomasi dalam Arthashastra Sebagai Dasar Strategi Diplomasi Pertahanan Negara**

Konsep diplomasi dalam Arthashastra merupakan hal yang penting untuk diketahui jika peneliti hendak menjadikan Arthashastra sebagai dasar strategi diplomasi pertahanan. Konsep diplomasi dalam arthashastra di jabarkan kedalam terminologi *Mantrashakti*. Penerapan dari diplomasi dalam arthashastra di jabarkan kedalam dua teori besar. Pertama adalah enam kebijakan luar negeri (*ṣāḍgunya*). Kedua adalah empat metode diplomasi (*catur upaya*).

Setelah pengertian mengenai konsep diplomasi di peroleh, peneliti kemudian mengkonstruksi konsep diplomasi pertahanan menurut pandangan Chanakya dalam karyanya, Arthashastra. Konsep diplomasi pertahanan negara dalam Arthashastra diperoleh melalui analisa terhadap pandangan Chanakya pada teori diplomasi (*mantrashakti*, *ṣāḍgunya*, dan *catur upaya*), *teori mandala*, *saptanga*, dan *tri shakti*. Kemudian, konsep

---

<sup>139</sup> Michael Liebig, "Statecraft and Intelligence Analysis in the Kautilya- Arthashastra" dalam *Indigenous Historical Knowledge: Kautilya and His Vocabulary*, volume 3. (New Delhi : Institute for Defence Studies and Analysis (IDSA), 2017) hlm.53-4

diplomasi pertahanan menurut pandangan Chanakya dalam Arthashastra ini harus dilihat kembali relevansinya.

#### **4.2.3.1 Analisis Konsep Diplomasi Pertahanan dalam Arthashastra Sebagai Dasar Strategi Diplomasi Pertahanan Negara**


Diplomasi dalam pandangan Chanakya merupakan bagian dari strategi besar mempertahankan eksistensi dari negara. Penekanan mengenai diplomasi dalam pandangan Chanakya berada pada beberapa konsep besar seperti *mantrashakti* (*power* negara yang digunakan untuk mempengaruhi negara lain dan termasuk diplomasi di dalamnya); *śāḍgunya*, enam kebijakan luar negeri yang digunakan secara paralel dengan teori *mandala* dan juga hasil penilaian dari *saptanga* sebuah negara; dan *catur upaya* atau empat cara yang digunakan secara umum dalam melaksanakan diplomasi antar negara.

Lebih lanjut, ketika kita melihat dan menganalisis secara holistik mengenai konsep-konsep yang dijabarkan oleh Chanakya, baik itu dalam teori *mandala*, *śāḍgunya*, *saptanga*, dan juga *catur upaya*, kita dapat melihat sebuah pola di mana sesungguhnya Chanakya memberikan penekanan yang cukup besar terhadap pentingnya sebuah negara memiliki *allies* atau sekutu.

Doktrin dari pemikiran Chanakya memanfaatkan konsep aliansi sebagaimana dijelaskan dalam teori keseimbangan kekuasaan. Chanakya mengaitkan aliansi antar negara menggunakan berbagai jenis perjanjian damai (*Samdhi*). Dalam menganalisis berbagai jenis aliansi, saran Chanakya bergantung pada kekuatan relatif antara negara-negara bagian. Pilihan kebijakan Chanakya tentang *Samsraya* (mencari perlindungan) mirip dengan konsep kontemporer mengenai *bandwagoning* sementara kebijakan *Yana* (mempersiapkan perang), *Dvaidhibhava* (kebijakan ganda), dan *Samdhi* (perdamaian) analog dengan keseimbangan internal dan eksternal suatu negara.

Sementara itu dalam menghadapi keadaan internasional yang anarki Chanakya menitik beratkan pada pelaksanaan *ṣāḍguṇya* dan *catur upaya*. jika kita bandingkan dan analisis antara *ṣāḍguṇya* dengan *contemporary instrument of power* yakni DIME (*Diplomacy, Information, Military and Economy*) sebagaimana ditunjukkan pada tabel 4.2 tentang Perbandingan DIME, *Ṣāḍguṇya* dan *Power Option*, maka dapat terlihat bahwa sebagian besar kebijakan dalam *ṣāḍguṇya* terletak pada domain diplomasi. Hal ini sesungguhnya berkorelasi dengan analisis dari Chanakya bahwa untuk menilai kekuatan relatif antar negara kekuatan intelektual sebuah bangsa (kekuatan nasihat dan diplomasi) atau *mantrashakti* itu jauh lebih penting daripada kekuatan militer (*prabhava-shakti*) ataupun kepemimpinan (*utsaha-shakti*).

**Tabel 4.3 Perbandingan DIME, *Ṣāḍguṇya* dan *Power Option***

Instrument Power kontemporer	Enam kebijakan Luar negeri Chanakya <i>Ṣāḍguṇya</i>	Jenis Perang menurut Chanakya	Peperangan sebagai <i>hard power</i>
Diplomasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sandhi – Membuat Perdamaian</li> <li>- Dvaidibhava – Kebijakan Ganda</li> <li>- Samsraya – mencari perlindungan</li> <li>- Asana – Netral</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perang Rahasia menggunakan langkah-langkah penghianatan dan psikologis</li> <li>- Perang diplomatic menggunakan langkah-langkah diplomatic offensive</li> <li>- Perang yang tidak di deklarasikan, menggunakan metode kladestin, pembunuhan rahasia dan gen rahasia</li> <li>- Perang terbuka pada waktu dan tempat yang ditentukan</li> </ul>	Intensitas yang lebih rendah
Informasi			
Militer	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Yana – Bersiap untuk perang</li> <li>- Viragaha - Perang</li> </ul>		
Ekonomi			

Sumber: Kumar, Abhishek (2016)

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa *śāḍgunya* menekankan lebih banyak pada diplomasi ketimbang militer dalam DIME. Namun bukan berarti dua bagian lainnya tidak mendapatkan perhatian penting. *Information* mendapatkan peranan penting pula namun bukan sebagai bagian integral dari *śāḍgunya*. *Information* dalam Arthashastra menjadi bagian yang seolah berdiri sendiri dalam kerangka kerja intelijen. Namun hasil *assesement* intelijen dalam bentuk telik-sandi dan informasi rahasia menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan yang akan diambil dalam range *śāḍgunya* ini. Antara diplomasi atau militer, antara damai atau perang.

Dalam *śāḍgunya* kepentingan ekonomi tidak terlalu nampak. Namun bukan berarti Chanakya tidak memberikan perhatian pada bagian ini. Menurut Chanakya, perekonomian merupakan elemen kekuatan negara yang penting bagi negara. Posisi perekonomian sama penting dengan porsi militer, bahkan dalam beberapa kasus perekonomian jauh lebih penting daripada militer itu sendiri.

Sesungguhnya tentara berakar pada perbendaharaan negara. Jika tidak ada perbendaharaan negara, tentara akan menyebrang ke musuh atau membunuh raja sendiri. Dan Perbendaharaan-lah yang menjamin keberhasilan semua usaha, ..... tetapi sesuai dengan tempat, waktu dan kerja, salah satu diantara perbendaharaan dan tentara akan menjadi penting. Karena tentara merupakan alat untuk memperoleh dan melindungi perbendaharaan negara, perekonomian adalah alat dari perbendaharaan dan tentara. Oleh karena menghasilkan semua obyek, maka bencana perbendaharaan itu lebih gawat. (Arthashastra 8.1. 47-52)<sup>140</sup>

Sutra ini menegaskan bahwa perekonomian atau perbendaharaan negara lebih penting keberadaannya. Karena perbendaharaan negara ini akan mempengaruhi berbagai sektor dan atau elemen negara yang lain, kemudian berpengaruh terhadap *power* negara secara agregat.

Chanakya juga menegaskan dalam Arthashastra 2.12.37 bahwa *“dari perbendaharaan kekuatan angkatan bersenjata dibangun. Dengan*

<sup>140</sup> Made Astana dan CS. Adiputro, *op.cit.* hlm 498-9

*perbendaharaan dan angkatan bersenjata, tanah diperoleh dengan perbendaharaan sebagai hiasannya*<sup>141</sup>. Dalam hal ini Chanakya merujuk pada pembangunan kekuatan militer itu dilakukan dengan bantuan perbendaharaan negara. Ketika kekuatan angkatan bersenjata negara prima, mereka dapat menambah kekayaan dengan cara mengakuisisi atau menaklukkan kerajaan lainnya (merujuk pada pemaknaan tanah) dan juga mendapatkan perbendaharaan (dari negara lawan), bisa dalam bentuk upeti, pajak, atau penguasaan sumber daya alam dan tambang dari wilayah yang diakuisisi sebagai bonus yang diperoleh (hiasannya).

Pada kenyataannya, Chanakya percaya bahwa bangsa-bangsa bertindak dalam kerangka pencapaian kepentingan politik, ekonomi maupun militer mereka. Chanakya berpikir bahwa kebijakan luar negeri ataupun diplomasi akan dipraktekkan selama itu bermanfaat bagi kepentingan mereka karena setiap negara pada dasarnya bertindak sedemikian rupa untuk memaksimalkan *power* mereka dan juga mencapai kepentingan negaranya. Chanakya, sebagai seorang realis memikirkan bahwa dunia internasional ini berada dalam keadaan yang sedemikian rupa di mana setiap kerajaan/negara sesungguhnya sedang berperang atau mempersiapkan perang dengan negara lainnya dan diplomasi merupakan senjata lain yang digunakan dalam peperangan yang konstan ini.<sup>142</sup>

Chanakya mendefinisikan diplomasi sebagai serangkaian tindakan yang diambil oleh kerajaan/negara sehingga ia memperoleh kekuatan dan akhirnya mampu menaklukkan negara melalui hubungan diplomatik yang dibuat. Menurut Chanakya perjanjian dibuat sedemikian rupa sehingga menguntungkan dan bermanfaat bagi kerajan/negara.<sup>143</sup> Dengan kata lain, pada dasarnya Chanakya menyarankan bahwa dalam menjalankan diplomasi tidak ada posisi (baik sekutu ataupun musuh) yang

---

<sup>141</sup> *Ibid.* hlm. 127

<sup>142</sup> Tentu perang disini tidak merujuk semata pada perang fisik yang melibatkan militer saja.

<sup>143</sup> Pravin Chandrasekaran, *Kautilya: Politics, Ethics and Statecraft*. (Harvard Kennedy School: Munich Personal RePEc Archive, 2006.) hlm. 18

permanen/abadi. Karena ketika keadaan lingkungan strategis berubah, maka sikap diplomatik juga harus menyesuaikan (berubah). Dalam upaya memahami kerangka berpikir Chanakya ini diperlukan sebuah teori yang disebut oleh Gadamer sebagai *preunderstanding*.

Gadamer (dalam susanto, 2016) mengatakan bahwa “pra-pemahaman” atau *preunderstanding* ini merupakan posisi awal penafsir yang memang pasti ada ketika dia membaca teks. Keharusan ini maksudkan agar seorang penafsir mampu mendialogkan pra-pemahaman yang dimiliki dengan isi teks yang ingin ditafsirkan. Namun kemudian pra-pemahaman ini harus terbuka untuk dikritisi, direhabilitasi dan dikoreksi oleh penafsir itu sendiri ketika ia sadar atau mengetahui bahwa prapemahamannya tersebut tidak sesuai dengan apa yang dimaksud oleh teks yang ditafsirkan. Hasil dari rehabilitasi atau koreksi terhadap pra-pemahaman itu kemudian disebut dengan istilah *Volkemmenheit des Vorverstandnisses* atau kesempurnaan pra pemahaman.<sup>144</sup>

Dengan demikian, untuk dapat memahami gagasan-gagasan filsafat politik yang dikemukakan oleh Chanakya seorang penafsir harus memiliki pra-pemahaman mengenai berbagai paradigma yang berkembang dalam filsafat politik itu sendiri. Untuk kemudian mengerti berada pada spektrum paradigma apa, gagasan yang dibangun oleh Chanakya. Pra-pemahaman tersebut kemudian dapat dijadikan dasar untuk menelaah spektrum paradigma dari gagasan-gagasan filsafat politik Chanakya. Melalui pra-pemahaman inilah penafsir kemudian dapat mengerti bahwa sebagian besar gagasan filsafat politik Chanakya berada pada spektrum paradigma realisme politik.

Paradigma realisme yang sangat kental dalam tercermin dalam konsep-konsep yang dikemukakan oleh Chanakya. Secara positif, ini membuat negara akan selalu waspada akan setiap kemungkinan terburuk yang dapat terjadi. Namun, tak dapat dipungkiri bahwa hal ini juga

---

<sup>144</sup> Edi Susanto, 2016 *op.cit.* 52-3

membawa dampak negatif, demikian pula dalam menjalankan diplomasi. Anand Krishna, seorang Tokoh Hindu, menekankan secara khusus bahwa diplomasi yang dibangun oleh Chanakya berada pada tataran *fear base*, atau didasari oleh ketakutan.<sup>145</sup>

Perasaan *insecurity* bahwa negaranya bisa diserang kapan saja oleh siapa saja, sehingga untuk mencegah serangan dari negara lain, sekaligus menjaga keamanan, keselamatan dan kesejahteraan negara, negara harus memiliki kekuatan yang besar. Kekuatan besar ini yang kemudian dimanfaatkan, baik untuk menambah kekuatan ataupun menakuti negara lain/musuh agar tidak berani untuk menyerang negaranya. Semacam efek daya tangkal/*dettrence* dalam konsep hubungan internasional modern saat ini. Tapi ada hal mendasar dan sangat penting untuk disadari bahwa konsep ini tidak lagi bisa berlaku sama pada abad modern ini. *Fear base* dalam relasi antar negara itu tidak cukup. Pendekatan persahabatan bisnis, ekonomi ataupun perdagangan memerankan peranan yang lebih dominan saat ini pembuatan perdamaian pada abad ini lebih sering dilakukan dengan *sharing comodity* untuk mencapai *common interest* masing-masing negara.

Namun sesungguhnya jika melihat lebih jauh mengenai upaya mencapai kepentingan nasional dan juga penaklukan, maka sesungguhnya paradigma Chanakya tidak dapat dikategorikan sepenuhnya menjadi realis semata. Berdasarkan analisa kedua hal tersebut justru ambiguitas akan terlihat antara paradigma realisme dan juga idealisme. Dari perspektif idealis, fokus Chanakya bukan pada penaklukan hegemonik terhadap seluruh dunia, tetapi pada kemajuan ekonomi, stabilitas, dan keamanan negara. Berfokus lebih pada stabilitas dan keamanan, Chanakya membatasi wilayah penaklukan *Vijigishu* ke batas-batas Benua India, daripada menciptakan motivasi untuk penaklukan hegemonik yang tak ada habisnya.

---

<sup>145</sup> Wawancara 18 November 2018.

Sementara itu dari paradigma realisme Chanakya mendukung kebijakan hegemonik yang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan/kepentingan negara. Terlebih dalam interaksi antarnegara pencarian *power* dan keamanan yang maksimal merupakan hal yang naluriah terjadi. Meskipun menjelaskan mengenai pentingnya *ally* atau sekutu, Chanakya selalu menekankan untuk tidak bergantung pada aliansi atau sekutu dalam upaya membantu dan memajukan negara. Karena hal itu tidak berada dibawah kendali mereka secara langsung dan penuh. Chanakya meminta penguasa negara untuk berfokus mengoptimalkan *saptanga* karena *saptanga* berada dibawah kendali mereka langsung. Tidak seperti sekutu yang lebih sering tidak berada dibawah kendali penguasa negara secara langsung. Pemikiran realis yang berikutnya adalah Chanakya hanya memikirkan kepentingan negara sang *vijigṛṣu*. Kepentingan negara berada lebih di atas daripada kemajuan kemanusiaan global.

Lebih jauh, jika kita berupaya menganalisis mengenai pentingnya sebuah negara memiliki sekutu atau aliansi maka hal ini seolah-olah akan agak bersebrangan dengan politik luar negeri Indonesia yang bebas-aktif dan non-blok. Di mana Indonesia tidak pernah membangun aliansi dengan negara manapun, dan secara tegas Indonesia menjadi negara yang tidak memihak antara blok barat dan blok timur pada masa perang dingin berlangsung. Indonesia tidak membangun aliansi dengan negara manapun karena pandangan bahwa dalam setiap aliansi yang dibuat akan ada konsekuensi yang ditanggung bersama sebagai sebuah aliansi. Semisal salah satu negara dalam aliansi terlibat dalam konfrontasi dengan negara lain, maka Indonesia sebagai aliansinya kemudian memiliki “tanggung jawab moral” untuk membantu apapun yang terjadi, walau itu bersebrangan dengan keinginan dan kepentingan negara. Keadaan ini membuat Indonesia akan berada pada posisi negara netral dalam lingkaran konstelasi geopolitik mandala dari negara lain.

Namun hal yang juga perlu dikritisi lebih lanjut adalah pemaknaan dari kata *mitra* dalam Arthashastra. *Mitra* dimaknai sebagai aliansi atau

sekutu. Pada masa kerajaan keberadaan sekutu ini dipandang sebagai sesuatu yang nyaris abadi sepanjang kepentingannya masih sejalan. Sementara dalam perkembangan Hubungan Internasional saat ini nampaknya diperlukan sebuah pemaknaan baru terhadap kata *mitra* dalam Arthashastra. *Mitra* tidak hanya merujuk pada artian aliansi/sekutu namun juga dapat berarti pihak/negara yang diajak bekerjasama. Dengan demikian pemaknaan *mitra* menjadi lebih luas. Karena jika hanya dimaknai sebagai sekutu semata, maka cenderung akan memberikan kesempatan yang lebih sedikit untuk terjadi, terlebih karena sekutu dalam hubungan antar negara menuntut konsekuensi yang lebih besar dari sekedar rekan kerja. Pemaknaan mitra dari sekutu menjadi rekan kerja atau pihak yang diajak bekerjasama dapat membuka aksesibilitas penggunaan konsep ini pada zaman sekarang.

Ketika pemaknaan mitra ini telah diperluas menjadi rekan kerja/pihak yang diajak bekerja sama maka bentuk-bentuk kerjasama antar negara yang terjadi dalam kerangka regionalisme (ASEAN) bahkan kerjasama bilateral dan multilateral dapat dikategorikan sebagai upaya negara membangun/menjadi mitra. Dalam konteks politik luar negeri bebas aktif, maka sesungguhnya Indonesia telah menjadi negara dengan jaringan mitra yang luar biasa besar. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa melalui politik bebas aktif dan komitmen sebagai negara non-blok Indonesia memiliki modal sosial yang ditinggi dimata negara-negara lain di dunia.

Upaya Indonesia membangun jaringan dan modal sosial ini terlihat jelas dalam pengejawantahan politik luar negeri bebas aktif Indonesia selama satu dekade ke belakang. Politik Luar Negeri Indonesia yang bebas aktif di masa Kepemerintahan Presiden Susilo Bambang Yoedhoyono di bukan lagi mengedepankan "*Rowing between the Two Reefs*" (medayung diantara dua karang). Dibawah kepemimpinan Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa, Polugri Indonesia berada pada prinsip "*Navigating a Turbulent Ocean*" (Mengarungi samudra bergejolak) dengan Doktrin Natalegawa yang disebut sebagai "*Dynamic Equilibrium*" (keseimbangan dinamis).

Dalam doktrin ini, Marty Natalegawa mendefinisikan *Dynamic Equilibrium* sebagai keselarasan dalam melakukan kerjasama antar negara dalam interaksi yang dilakukan secara damai. Dengan demikian, hal tersebut dapat menghasilkan rasa saling menguntungkan, namun tidak menimbulkan dominasi kekuatan tunggal dalam kawasan.<sup>146</sup> Secara garis besar doktrin ini merupakan pendukung kebijakan *Zero Enemy Thousand Friends* pada masa pemerintahan SBY. Dapat dikatakan demikian karena, esensi dasar doktrin ini adalah menciptakan kerangka kerjasama multilateral yang bersifat *win-win solution* untuk menciptakan *trust building* dan mengikis potensi munculnya konflik antar negara. Upaya meredam konflik antar negara melalui kerjasama yang *win-win solution* merupakan cara “mendulang banyak kawan” dan “meniadakan musuh”.

Sementara itu pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo Politik Luar negeri Indonesia masih berlandaskan Politik Bebas-Aktif, namun pendekatan kebijakannya diarahkan pada Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia (*Global Maritime Fulcrum*). Kebijakan ini ditujukan untuk membangun kembali martabat Indonesia sebagai negara maritime. Slogan yang digunakan adalah Indonesia cinta perdamaian namun lebih cinta kemerdekaan. Dengan artian Indonesia akan bersahabat dengan negara manapun, namun jika kepentingan, martabat, dan kedaulatan negara diganggu, Indonesia tidak akan tinggal diam. Dalam hubungan antar negara Indonesia berposisi sebagai *Honest Broker*, jembatan penghubung antara negara-negara yang berkonflik.<sup>147</sup> Kebijakan luar negeri yang dilaksanakan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo sesungguhnya adalah

---

<sup>146</sup> Steven, Yohanes. “Telaah Doktrin Natalegawa, ‘Dynamic Equilibrium’ Terhadap Kepentingan Ekonomi Indonesia: Studi Kasus Keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2011.” (2011) dalam <https://stevenyohanes.wordpress.com/2013/12/19/telaah-doktrin-natalegawa-dynamic-equilibrium-terhadap-kepentingan-ekonomi-indonesia-studi-kasus-keketuaan-indonesia-di-asean-tahun-2011/#comments> diakses pada 16 Desember 2018

<sup>147</sup> Muhammad Tri Andika dan Allya Nur Aisayah, “Analisis Politik Luar Negeri Indonesia-China di Era Presiden Joko Widodo: Benturan Kepentingan EKonomi dan Kedaulatan?”, *Indonesian Perspective*. Volume 2, Number 2 (Juli-Desember 2017) hlm 161-179

upaya melanjutkan warisan modal sosial yang telah dilakukan pada masa pemerintahan SBY. Terlihat dari jenis kerjasama yang mengedepankan *win-win solution* dengan berbagai negara, namun dengan penekanan terhadap diplomasi maritime dan juga martabat serta kedaulatan negara<sup>148</sup>.

Konsep Diplomasi dalam Pustaka Arthashastra karya Chanakya dijabarkan dalam *Mantrashakti* sebagai kekuatan ucapan, narasi lisan maupun tulisan untuk mencapai tujuan negara. *Mantrashakti* dalam Arthashastra merupakan bagian integral dan paling penting dari kekuatan yang harus dimiliki negara. Konsep *Mantrashakti* dapat menjadi paradigma dasar dalam diplomasi pertahanan di mana diplomasi diletakkan sebagai salah satu kekuatan terpenting yang harus dimiliki secara mumpuni oleh sebuah negara. Diplomasi digunakan sebagai *first line* dan *last line of defense* yang diejawantahkan dalam kebijakan luar negeri terhadap negara-negara yang ada dalam perpolitikan internasional. *Samdhi*, *dvaiddibhava*, *samsraya*, dan *asana* di gunakan sebagai *first line* (upaya *preventive*) untuk menggalang kekuatan dan memastikan negara lain tidak menyerang/bersebrangan negara sang *vijigīṣu*. Sementara *Samdhi* dan *samsraya* dapat digunakan sebagai *last defense* ketika perang tidak dapat dielakkan dan kedamaian diupayakan untuk mengurangi efek destruktif dari perang terhadap masyarakatnya. Dalam melaksanakan poin-poin *Ṣādgūṇya* ini *catur upaya* di jalankan melalui *sama*, *dama*, *bedha*, dan *danda*.

#### **4.2.3.2 Korelasi konsep Diplomasi Pertahanan dalam Pandangan Chanakya Arthashastra dan Praktik Diplomasi Pertahanan Negara Republik Indonesia**

Diplomasi pertahanan dalam pandangan Chanakya Arthashastra dapat dijabarkan dalam kerangka sebagai berikut. Diplomasi menurut

---

<sup>148</sup> Terlihat dari ketegasan Indonesia dalam menghadapi *illegal fishing* dengan melakukan penggegelaman kapal-kapal nelayan negara asing yang kedapatan mencuri ikan di wilayah Kedaulatan Indonesia. Ketegasan ini dipandang tidak tampak pada Era presiden SBY utamanya ketika kasus penyadapan yang dilakukan oleh Australia terhadap Presiden SBY dan Pejabat Tinggi Negara RI lainnya.

Chanakya dalam Arthashastra disebut sebagai *Mantrashakti*. Diplomasi sebuah negara dipengaruhi oleh dua hal besar. Pertama adalah konsep pemetaan ancaman, utamanya ancaman eksternal yaitu teori mandala/*circle of state*. Kedua adalah hasil penilaian atau assesment dari tujuh elemen yang membentuk sebuah negara/teori *saptanga*. Dalam menjalankan diplomasi ini maka terdapat enam kebijakan luar negeri/*ṣāḍgunya* yang diaplikasikan dengan memperhitungkan teori mandala dan juga teori *saptanga*. Adapun aktor utama yang terlibat dalam *ṣāḍgunya* ini antara lain pemimpin negara/raja, pimpinan angkatan bersenjata, dan diplomat (yang juga berperan ganda sebagai agen intelijen negara).

Dari *ṣāḍgunya* ini kemudian strategi diplomasi pertahanan yang diinginkan untuk dijalankan dengan sebuah negara dimunculkan. Adapun bentuk kegiatannya antara lain: *join march*<sup>149</sup>, *join excersise*<sup>150</sup>, pembelian alutsista, pelatihan prajurit, dan pembuatan pakta pertahanan<sup>151</sup>. Kemudian cara-cara dalam menjalankan diplomasi pertahanan ini dilaksanakan menggunakan *catur upaya*, yaitu *sama*, *dama*, *bedha* dan *danda*.

Karena dijiwai oleh pemikiran realis diplomasi pertahanan yang dijalankan berdasar pandangan Chanakya dalam Arthashastra berujung pada terciptanya *prabhava shakti* atau yang pada ilmu hubungan internasional modern dikenal sebagai *effect deterrence* atau efek daya tangkal. *Prabhava shakti* sebagai bentuk *power* bukanlah akhir yang ingin dicapai oleh Chanakya. Kepemilikan *prabhava shakti* ini ditujukan untuk mewujudkan *yogakshema* atau kesejahteraan, kebahagiaan, keamanan dan kemakmuran rakyat sebuah negara.

Kerangka diplomasi pertahanan dalam pandangan Chanakya dalam magnum opusnya, Arthashastra dapat dilihat pada gambar 4.9 mengenai

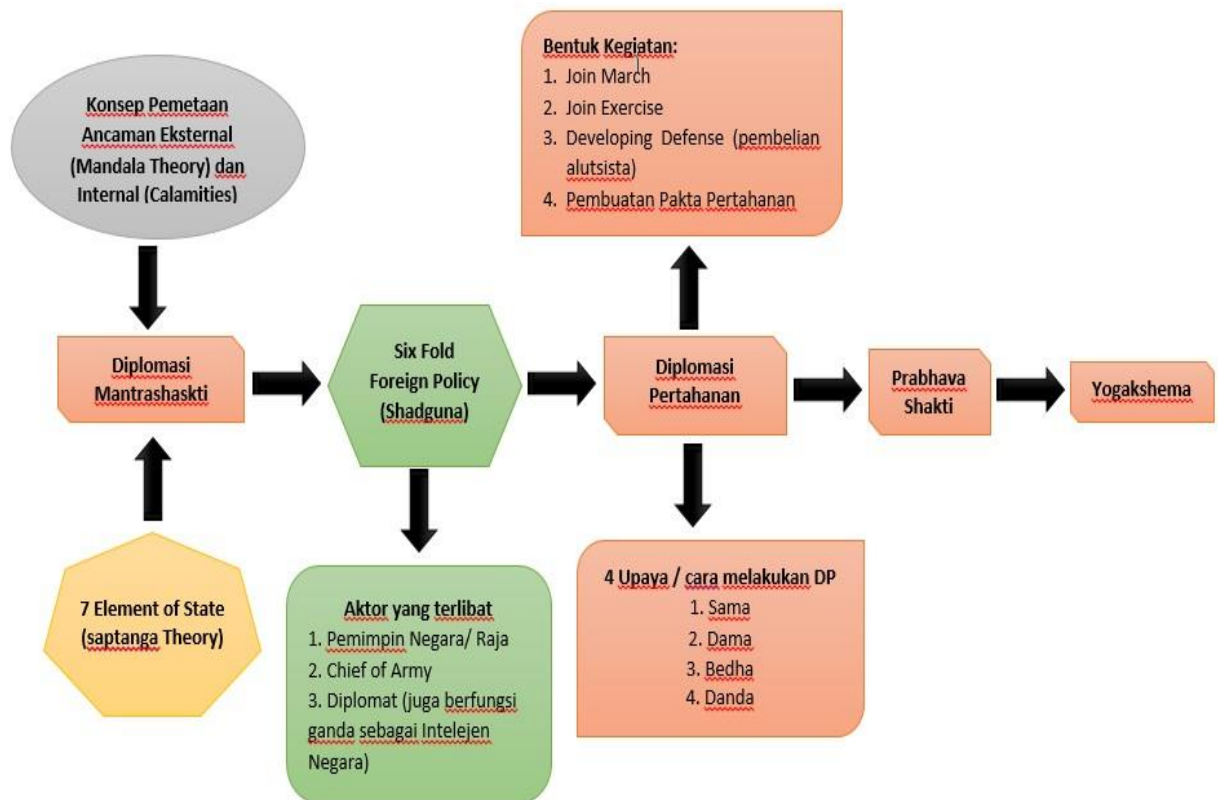
<sup>149</sup> *Join march* merujuk pada keadaan di mana sang vijigisu bersama sekutunya melakukan *march* bersama untuk melawan negara musuh

<sup>150</sup> Merujuk pada keadaan di mana sang vijigisu bersama negara mitra/ sekutu melakukan latihan bersama baik dengan latihan perang bersama ataupun latihan strategi bersama

<sup>151</sup> Pakta pertahanan bisa dibuat dengan mitra ataupun musuh. kerajaan Maurya dibawah pemerintahan Chandragupta tercatat pernah membuat pakta pertahanan dengan Seloucos Nicator (Penguasa Yunani di Asia Barat)

Konstruksi Diplomasi Pertahanan Negara dalam pandangan Chanakya-Arthashastra.

### Diplomasi Pertahanan Dalam Pandangan Chanakya Arthashastra



Gambar 4.9. Konstruksi Diplomasi Pertahanan Negara dalam pandangan Chanakya-Arthashastra

Sumber: Hasil Olah Peneliti dari berbagai sumber terkait Arthashastra, 2018

Konstruksi diplomasi pertahanan negara berdasarkan pandangan Chanakya dalam Pustaka Arthashastra berada pada lingkup paradigma realisme. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa dalam menghadapi perkembangan politik internasional saat ini, pendekatan realis yang terlalu murni sebagaimana dijabarkan Chanakya dalam Arthashastra ini dipandang tidak cukup sempurna. Diperlukan penyesuaian pada beberapa bagian termasuk pemberian interpretasi baru, sehingga pendekatan Chanakya dapat dijadikan sebuah *grand* strategi yang tak lekang oleh zaman.

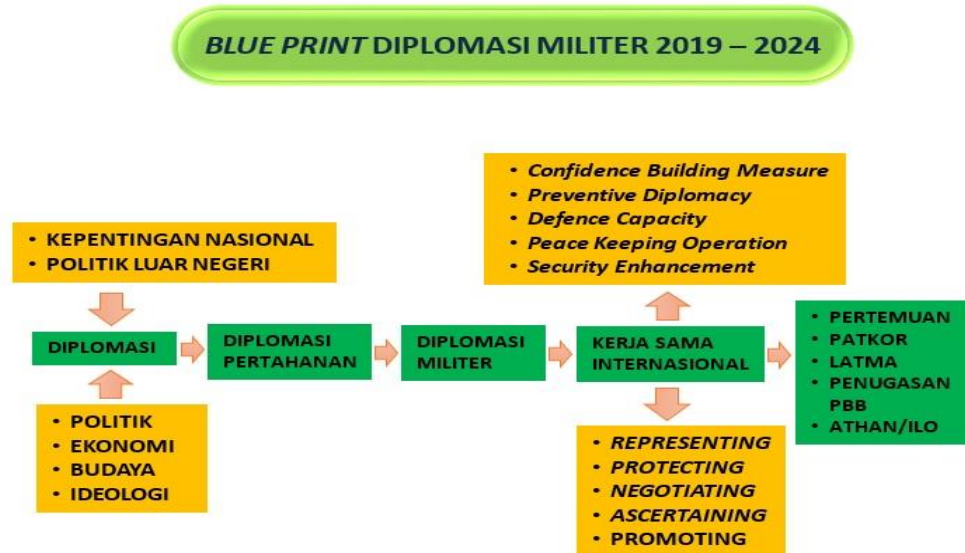
Paradigma Diplomasi Pertahanan berdasarkan pandangan Chanakya dalam Arthashastra ini terlalu militeristik. Hal ini dapat dimengerti karena sifat ancaman yang berkembang pada masa itu adalah ancaman bersifat tradisional. Ancaman berasal dari luar negara berupa invasi dari negara lain.<sup>152</sup> Maka dari itu kemudian sistem pertahanan negara dan reaksi terhadap penanggulangan ancaman yang menimpa negara masih bersifat tradisional (militeristik). Dengan demikian ketika hendak mengaplikasikan paradigma ini ke masa sekarang diperlukan pendekatan yang lebih holistik. Pendekatan holistik ini tidak hanya melibatkan unsur militer dalam pertahanan negara, baik dalam pemetaan dan penanggulangan ancaman, diplomasi, termasuk di dalamnya pada pembuatan strategi dan kebijakan pertahanan. Keberadaan unsur non-militer akan menghasilkan sebuah pendekatan yang lebih holistik.

Jika dianalisa lebih jauh sesungguhnya kerangka kerja diplomasi pertahanan menurut pandangan Chanakya tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan diplomasi militer Indonesia yang merupakan bagian dari diplomasi pertahanan Indonesia. Hal ini disebabkan karena memang diplomasi pertahanan dalam kerangka Chanakya merupakan kerangka yang *military heavy* dan berfokus pada ancaman yang masih bersifat tradisional. Namun jika dilihat secara lebih holistik, maka akan terlihat bahwa terdapat beberapa perbedaan antara kerangka kerja diplomasi pertahanan menurut pandangan Chanakya dalam Pustaka Arthashastra dengan kerangka kerja diplomasi pertahanan Indonesia. Hal ini bisa terjadi karena dalam diplomasi pertahanan Indonesia yang berkembang saat ini, unsur-unsur nir-militer telah terlibat pada porsi tertentu. Unsur-unsur nir-militer ini muncul sebagai reaksi atas proliferasi ancaman yang dihadapi oleh Indonesia.

---

<sup>152</sup> Pada saat arthashastra disusun kerajaan Maurya juga sedang menghadapi invasi yang dilakukan oleh The Great Alexander.

Kerangka diplomasi militer Indonesia dapat dilihat pada Gambar 4.10 tentang Blueprint Diplomasi Militer 2019-2024.<sup>153</sup>



Gambar 4.10 Blueprint Diplomasi Militer 2019-2024

Sumber: Adji, Saptono, 2018

Dalam *blueprint* ini terlihat bahwa diplomasi militer sebagai bagian dari diplomasi pertahanan, di mana militer menjadi aktor yang memainkan peranan signifikan di dalamnya. Berdasarkan bagan ini pula dapat diketahui bahwa diplomasi pertahanan Indonesia tidak dapat hanya diidentikkan dengan diplomasi militer, di mana aktornya hanya militer dan kementerian pertahanan. Hal ini terlihat dari mesin diplomasi Indonesia yang digerakkan oleh kepentingan nasional, politik luar negeri, politik dalam negeri, ekonomi, budaya dan juga ideologi. Hal ini membuat militer tidak menjadi *single fighter* dalam arena diplomasi pertahanan di Indonesia. Setidaknya dalam setiap aktivitas diplomasi pertahanan terdapat dua unsur kementerian yang selalu terlibat, yaitu kementerian pertahanan (termasuk TNI di dalamnya) dan juga kementerian luar negeri. Sedangkan secara umum untuk kasus-kasus tertentu, aktor lain seperti kementerian lembaga

<sup>153</sup> Paparan Brigjen TNI Saptono Adji, Direktur B BAIS TNI. Dalam Focus Group Discussion Pusat Studi Diplomasi Pertahanan, 19 Juli 2018.

terkait juga menjadi subjek diplomasi pertahanan Indonesia. Seperti misalnya dalam kerjasama pertahanan pembelian shukoi dengan metode imbal dagang, maka Bappenas dan Kementerian Perdagangan beserta Kementerian Pertahanan dan Kementerian Luar negeri yang menjadi aktornya.<sup>154</sup> Intinya dalam Diplomasi Pertahanan Indonesia seluruh sektor di kementerian ataupun di lembaga terkait menjadi sebuah kesatuan yang saling melengkapi dan saling mendukung demi tercapainya tujuan negara.

Terdapat perbedaan praktik diplomasi pertahanan dalam pandangan Chanakya arthashastra dengan praktik diplomasi pertahanan modern yang berlaku saat ini. perbedaan maupun persamaan tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.4 tentang Perbandingan konsep Diplomasi Pertahanan dalam Pandangan Chanakya Arthashastra dengan Konsep Diplomasi Pertahanan Modern yang dilaksanakan pada masa sekarang.

**Tabel 4.4 Perbandingan Konsep Diplomasi Pertahanan**

<b>Variabel</b>	<b>Diplomasi Pertahanan menurut Chanakya Arthashastra</b>	<b>Diplomasi Pertahanan Modern</b>
<b>Aktor</b>	Negara (Raja, Angkatan Bersenjata, Diplomat, Intelejen)	1. Negara (Pemimpin Negara, kementerian/ Lembaga militer dan non militer, angkatan bersenjata) 2. Non Negara (Industri pertahanan / bisnis Pertahanan)
<b>Nature</b>	Militeristik	Hybrid (militer dan non militer)
<b>Platform kerjasama</b>	Antar negara saja / government to government	1. Government to Government, 2. Government to Bussiness, 3. Bussiness to Bussiness (dibawah pengawasan negara)

<sup>154</sup> Wawancara Letjen TNI (Purn) Dr. Yoedhi Swastanto, Dirjen Strahan Kemhan 2014-2017 dan Kol. Kav. Oktaheroe Ramsi, Kasubdit Multilateral Dirjenstrahan Kemhan.

<b>Paradigma</b>	Realis	Neo-realis, Konstruktivisme
<b><i>Interstate relation</i></b>	Konflikual; saling curiga; negara tetangga merupakan musuh alami dan potensial, namun derajat hubungan tergantung dari sikap dan reson negara tetangga terhadap negara yang bersangkutan ( <i>vijigisu</i> )	Sebagian besar menganut paham regionalisme; kerjasama untuk mewujudkan kepentingan bersama ( <i>common interest</i> )
<b>Bentuk kegiatan</b>	<i>Join March; join exercise; Developing defense</i> (Alutsista dan SDM); pakta perdamaian	Pertukaran perwira, latihan bersama, patrol bersama, kerjasama industri pertahanan, pengiriman pasukan perdamaian.
<b>Tujuan diadakan Diplomasi Pertahanan</b>	Prabhava shakti, terbentuknya <i>deterrence effect</i> negara yang kuat sehingga negara bisa mencapai <i>yogakshema</i> (keamanan, kesejahteraan dan kebahagiaan rakyat)	Terbentuknya <i>Confidence Building Measure</i> (CBM), rasa saling percaya antar negara, sehingga negara bisa mencapai kepentingan nasionalnya sekaligus dengan terciptanya keamanan bersama di region

Sumber: Konstruksi Penulis dari berbagai sumber, 2018

Jika ditelaah lebih jauh, sesungguhnya konsep-konsep Arthashastra perdasarkan pandangan Chanakya dapat dijadikan bahan kajian dalam upaya membangun strategi diplomasi pertahanan Indonesia. Prinsip dasar Chanakya dalam Pustaka Arthashastra adalah upaya membangun kesejahteraan negara dengan membangun sejumlah elemen. Salah satu hal yang sangat penting adalah mendapatkan dan menggunakan SDM yang unggul untuk mengabdikan kepada bangsa dan negara. SDM unggul di bidangnya sangat penting, terlebih untuk hal-hal yang sangat serius seperti pertahanan. Chanakya juga berbicara tentang *political ethic* yang sangat penting dikaji untuk dapat diterjemahkan dengan sistem di Indonesia.

Konsep *Mantrashakti* dapat diadopsi dan dikembangkan dalam pola Diplomasi Pertahanan Indonesia. Jika dikaji lebih jauh, *mantrashakti* merupakan kekuatan yang dibangun di atas kecerdasan (pikiran/*manana*, urat kata dari *mantra*) dan secara umum mantra berarti ucapan. Jadi *mantrashakti* merupakan upaya kekuatan yang dibangun di atas kecerdasan dan kekuatan narasi manusia termasuk perkataan dan tulisan. *Mantrasahakti* dalam Arthashastra dikenal sebagai *soft power diplomacy*, yakni menasehati, mengarahkan, sesuatu melalui kekuatan lisan yang membuat seseorang (dalam hal ini Raja Chandragupta) rela mengambil tindakan yang dibutuhkan demi tujuan besar peradaban. Untuk hal ini, Indonesia memerlukan *patern* mendidik putra-putri bangsa yang memiliki keunggulan dibidang ini. *Mantrashakti* juga menyangkut narasi non lisan, dalam hal ini berupa tulisan. Menurut data perbukuan di Indonesia, selain minat baca yang kurang, jumlah publikasi juga sangat rendah sehingga kekuatan *mantrashakti* harus diupayakan dengan sungguh-sungguh. Narasi tertulis juga memiliki kekuatan yang luar biasa untuk menimbulkan persepsi bagi warga dunia tentang Indonesia. Dominasi barat atas narasi tulisan harus dihentikan jika ingin membangun *mantrashakti* dan Indonesia harus memperhatikan hal ini. Dalam Bahasa Veda, intelektualitas menjadi kunci dan penentu diplomasi. Bahkan dalam Bahasa Chanakya, intelektualitas ini dapat melakukan ‘pembunuhan’ masal bahkan bayi dalam kandungan sekalipun.

India tampaknya menggunakan kekuatan ini tanpa terdeteksi oleh Barat, setidaknya pada awal program ini. India telah berhasil secara perlahan menguasai kancah ilmiah dunia dengan menempatkan para ilmuwan India pada berbagai bidang seperti NASA dan perusahaan raksasa berbasis teknologi. Dengan mudah, India dapat membangun *mantrashakti* tanpa harus berupaya keras menunjukkan keunggulan militer negaranya. Ketika ada perseteruan antar dua negara, India dengan mudah memainkan isu menarik ilmuwan yang membuat dunia tersadar betapa banyak sektor yang dipegang dan dikendalikan oleh India. Hal ini akan menjadi lebih kuat

ditambah dengan penanaman ideologi kesetiaan terhadap tanah air *Bharatavarsha* kepada masyarakat India walau sudah berganti kewarganegaraan. India dengan mudah tetap memberikan akses ke negaranya guna memperkuat hubungan emosi warga keturunan India walau secara resmi tidak lagi menjadi warga negara India dalam konteks negara modern<sup>155</sup>.

Jadi satu hal penting yang harus dilakukan oleh Indonesia dalam membangun Diplomasi Pertahanan kedepannya adalah mantrashakti yang dijabarkan dalam beberapa elemen dan ukuran yang harus dibangun, yakni SDM yang memiliki intelektualitas unggul yang mampu melakukan diplomasi baik melalui narasi/wacana baik melalui keunggulan retorika maupun tulisan yang dapat membangun persepsi baik masyarakat dunia terhadap Indonesia, selain itu juga membangun hubungan baik terhadap warga dunia yang memiliki pertalian darah dengan Indonesia, sebagai sebuah kekuatan besar yang tidak tampak, namun akan memberikan dampak luar biasa bagi pembangunan dan modal diplomasi yang sangat baik. Dari pengamatan, selama ini negara tidak membangun hubungan baik dengan warga negara lain yang sesungguhnya memiliki pertalian darah dengan Indonesia dan relative ada pengabaian. Pola berpikir bahwa warga negara hanyalah yang secara resmi menjadi warga negara sesungguhnya sama dengan pola berpikir Chanakya dalam menafsirkan negara sebagai sebuah daratan semata. Ini menjadi titik lemah yang mengakibatkan tidak langgengnya dinasti Maurya. Cina sesungguhnya telah membangun pola ini, walau secara kasar tetapi menguntungkan di mana keturunan Cina di seluruh dunia masih memiliki ikatan yang kuat dengan leluhurnya.

Sesuai dengan pendapat Zimmer (2011) fluktuasi pada situasi internasional modern ini menunjukkan bahwa teori-teori politik yang berkembang di India pada zaman purbakala mungkin sama sekali tidak ketinggalan zaman. Hal ini dimungkinkan karena teori politik India kuno

---

<sup>155</sup> Wawancara Dr. I Ketut Donder, Ph.D, 15 November 2018 dan Dr. (Cand) Ni Kadek Surpi 14 November 2018

memusatkan perhatian pada keselamatan dan kesejahteraan negara dan upaya diplomasi keluar untuk membangun keseimbangan. Kebijakan-kebijakan ini kedepan akan menjadi isu yang semakin santer dengan semakin maju dan berkembangnya pemikiran-pemikiran filsafat di Barat yang menginginkan semacam adanya *global ethic* di mana negara menghormati warga dunia dan membangun kesejahteraan bersama.<sup>156</sup>

Selain itu, konsep utama dalam pertahanan dan kenegaraan, *satya* dan *virya*, dapat dibangun guna membangun kekuatan di Indonesia. India mengajarkan konsep *satya* yakni kesetiaan, kepatuhan yang tinggi terhadap negara termasuk pimpinan negara. *Virya*-keberanian dan daya tahan seorang ksatria, yang mampu membalikkan kekalahan menjadi kemenangan telah tertanam kuat dalam berbagai risalah politik India. Indonesia tampaknya harus membangun kekuatan ini guna membangun negara yang kuat, yakni *satya* dari segenap elemen warga negara dan *virya* terutama bagi para ksatria-nya. Sebab dalam risalah politik India, tidak ada negara yang kuat tanpa *virya*.<sup>157</sup>

Menurut sejumlah informan<sup>158</sup>, beberapa pola tampak bersesuaian dengan yang dijalankan di Indonesia, hanya menggunakan bahasa yang berbeda. Hal yang paling menonjol adalah politik luar negeri yang bebas aktif, memiliki kesamaan pola dengan risalah dan kebijakan India kuno. Dalam teks Veda, manuskrip tertua di muka bumi, yang juga menjadi inspirasi bagi Chanakya menulis risalahan dan upaya membangun kesejahteraan negara, juga disertai dengan upaya membangun warga negara dunia. Kebijaksanaan Veda kuno mengajarkan untuk melakukan upaya membangun kesejahteraan dunia, menjaga keamanan dan menggunakan kecerdasan demi kemajuan bersama, bukan terikat territorial semata. Chanakya menjabarkan pola ini dengan membangun persahabatan dan kerjasama dengan kerajaan atau negara lain yang

---

<sup>156</sup> Heinrich. Zimmer, *Sejarah Filsafat India*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011) hlm.89

<sup>157</sup> Ibid.

<sup>158</sup> Wawancara Prof. Dr. I Made Titib

memenuhi syarat untuk dijadikan sahabat. Namun demikian, Chanakya mengajarkan kewaspadaan yang sangat tinggi karena selalu ada musuh yang mengintai. Kewaspadaan ini dapat diterjemahkan dengan berbagai cara seperti pola mengirimkan duta yang sekaligus merangkap agen rahasia atau seseorang yang ditugaskan secara total sebagai agen rahasia yang bekerja untuk negara.

Filsafat Politik Chanakya mengajarkan agar negara secara aktif membangun kesejahteraan warga dunia, bukan sekedar melakukan proteksi bagi negara semata, namun demikian harus ada pola yang kuat dalam penanganan kewaspadaan-atas musuh yang terlihat dan tidak terlihat. Hanya demikian, misi membangun perdamaian dunia sebagaimana tujuan besar dari Indonesia bisa terwujud sekaligus kewaspadaan atas musuh-musuh baik yang terlihat maupun musuh yang tidak terlihat. Membangun kesejahteraan dan kedamaian dunia tidak dapat dilakukan tanpa kewaspadaan yang tinggi mengingat karakter manusia atas kekuasaan yang sangat tinggi.

Selain itu, hal yang sangat penting saat ini adalah membangun dan mendidik warga negara untuk memiliki integritas, kesetiaan dan kecintaan terhadap bangsa dan negara ditengah upaya masuknya ideologi lain melalui jalur agama. Indonesia harus waspada dalam menghadapi tantangan ini dan membangun strategi yang tepat demi menyelamatkan bangsa dan negara. Saat ini yang harus diwaspadai oleh negara adalah bentuk-bentuk perang yang tidak terlihat tetapi memiliki daya rusak yang sangat dahsyat, diantaranya perang ideologi, perang berbalut ekonomi, membangun ketergantungan masyarakat pada suatu hal termasuk upaya menurunkan daya dan intelektualitas manusia dengan masuk dan dikonsumsi produk tertentu. Negara harus hadir untuk menyelamatkan warga negaranya dan mewaspadaai warga negara yang tidak setia atau menjual kesetiaannya demi keuntungan pribadi. Selain itu Indonesia memerlukan rumusan etika politik yang belakangan terlihat banyak politisi tidak mengindahkan etika politik. Negara tidak boleh lepas kontrol dalam

etika politik. Sebab seorang tokoh, walaupun figur buruk, ia tetap memberikan pengaruh, dalam Bahasa Chanakya menyebarkan racun kepada masyarakat dan masyarakat tertentu akan sangat gampang untuk mengikutinya.<sup>159</sup>

Selain itu, Indonesia harus mempertimbangkan teori geometri politik yang merupakan prinsip dasar dalam Arthashastra. Mandala atau lingkaran politik harus dipertimbangkan dalam membangun kekuatan politik negara. Para penentu kebijakan politik harus mampu menganalisis secara hati-hati ring-ring tersebut dan menggunakannya sebagai dasar untuk mengambil langkah politik. Sebagai sebuah prinsip sosial dan universal *taken for granted*, masing-masing menunggu kejutan demi kepentingan tertentu. Negara harus mampu memetakan negara-negara di sekitarnya dalam susunan mandala sesuai dengan arah kepentingan ataupun isu-isu tertentu demi tercapainya tujuan negara yang telah ditetapkan baik itu tujuan jangka pendek, menengah ataupun jangka panjang.

Jika ditelaah lebih jauh, saat ini Indonesia sesungguhnya telah memainkan konsep mandala dengan konstelasi geopolitik mitra-mitra. Sebuah konstelasi geopolitik dimana Indonesia berupaya merangkul negara-negara yang bertetangga langsung dan juga major power sebagai mitra dalam kerjasama, baik dalam hal pertahanan dan keamanan, ekonomi, sosial-budaya dan lain sebagainya. Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Ryamizard Ryacudu<sup>160</sup> menyatakan bahwa Indonesia melalui kemhan, saat ini mengadopsi Diplomasi Pertahanan Empat Poros. Diplomasi pertahanan empat poros ini merujuk pada upaya diplomasi pertahanan Indonesia untuk menjaga keseimbangan hubungan antara Amerika Serikat, Rusia, China dan juga ASEAN. Hubungan kerjasama ini dipandang sebagai hal yang sangat strategis seiring dengan meningkatnya

---

<sup>159</sup> Wawancara Dr. (Cand) Ni Kadek Surpi, M.Fil. dan Prof. Dr. I Made Titib, Ph.D.

<sup>160</sup> Kuliah Umum Menteri Pertahanan Republik Indonesia di hadapan Civitas Akademika Universitas Pertahanan, Auditorium Universitas Pertahanan, Sentul, tanggal 19 September 2018.

kesamaan cara pandang di dalam upaya mewujudkan *Mutual National Interest* di tengah kompleksitas dinamika lingkungan strategis di kawasan Asia-Pasifik saat ini. Melalui diplomasi empat poros ini, Indonesia berharap akan tercipta persatuan dan kerjasama yang kuat antar negara dan antar kawasan sehingga cita-cita mulia bersama, yaitu terwujudnya dunia yang lebih aman, damai dan sejahtera. Cita-cita tersebut merupakan esensi dan titik nol arah kompas yang harus selalu di kalibrasi, disesuaikan dengan keadaan situasi serta kondisi actual dari lingkungan strategis kawasan<sup>161</sup>.

Demikian pula, teori enam cara mendekati tetangga harus dikaji untuk membangun kekuatan politis tersendiri bagi Indonesia. Indonesia harus membangun sistemnya sendiri, namun dapat menjadikan sejumlah teori kuno sebagai pijakan dan inspirasi dan diterjemahkan ke dalam Bahasa dan konteks kekinian. Indonesia harus ramah, tetapi tidak boleh lengah. Teori maya, misalnya, sangat halus untuk melakukan upaya menaklukkan atau ditaklukkan. *Maya* berarti penipuan, menggelapkan dan prestasi diplomatis. Maya, dalam diplomasi juga menggunakan topeng, kebenaran agama dan kepribadian yang beradab, yang telah terbukti sebagai senjata ampuh dalam sejarah Barat tahun 1940-an, di mana para pemimpin perang harus mencari dukungan dari public yang diturunkan menjadi filsafat kewajiban moral, bukannya serangan yang tak kenal malu.<sup>162</sup>

Dalam konteks Diplomasi, maya juga berarti gerakan halus yang tidak terlihat namun memiliki kekuatan yang dahsyat. Dalam tradisi Hindu, maya dinyatakan sebagai kekuatan jahat yang tak kasat mata tetapi mampu mempengaruhi pola pikir, tindakan bahkan keputusan seseorang. Maya sebagai pengendali yang tidak terlihat. Maya bahkan dinyatakan mampu meruntuhkan karakter. Indonesia harus mewaspadaikan teori maya dan sekaligus menggunakan teori ini untuk memenangkan diplomasi. Menurut

---

<sup>161</sup> *Ibid.*

<sup>162</sup> Zimmer, 2011 *Op.cit.* Hlm 117-118

pengamatan, teori maya digunakan secara luas di abad modern ini, di mana guna memenangkan sesuatu menggunakan kekuatan yang tidak tampak sehingga sangat sulit untuk dilawan atau ditangkal. Mayashakti benar-benar sebagai kekuatan yang sangat sulit untuk dihadapi.<sup>163</sup> Tetapi aktor negara harus mampu merumuskannya dan menggunakan untuk membangun negara dan sekaligus memukul lawan. Kekuatan yang tak tampak ini lebih sulit dihadapi dan sekaligus jika digunakan juga sulit ditangkal oleh pihak lain. Diplomasi yang bermartabat dalam politik bebas aktif Indonesia, harus mewaspadai teori maya yang digunakan pihak lain guna memenangkan kepentingannya. Indonesia juga dapat menggunakan teori ini guna memenangkan diplomasi. Dalam sejarah peperangan di dunia, penggunaan teori maya terbukti memenangkan pertempuran yang sulit dengan mudah.

Secara teoretis konsep strategi diplomasi pertahanan Indonesia terlihat lebih komprehensif jika dibandingkan dengan konsep diplomasi pertahanan menurut pandangan Chanakya dalam Arthashastra. Hal ini terlihat dari pelibatan unsur-unsur nir-militer berupa kementerian/ lembaga terkait (non-pertahanan) dalam perumusan maupun eksekusi kebijakan diplomasi pertahanan. Ini merupakan sebuah langkah maju yang signifikan dalam menghadapi proliferasi ancaman pada masa globalisasi saat ini. Namun yang perlu menjadi catatan adalah kerangka *military heavy* yang dimiliki oleh Chanakya dalam Arthashastra ini alangkah baiknya juga menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan maupun strategi diplomasi pertahanan kedepannya. Penguatan kapasitas dan kapabilitas militer Indonesia (alutsista, SDM, maupun teknologi), harus diberikan porsi yang lebih banyak. Dalam hal ini ketersediaan dana untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas militer selanjutnya menjadi catatan penting dalam APBN Indonesia kedepannya.

---

<sup>163</sup> Wawancara Dr. (cand.) Ni Kadek Surpi Ayadharma dan Prof. Dr, I Made Titib,.

Praktik berikutnya yang patut dicontoh oleh Indonesia dari gagasan-gagasan Chanakya adalah kewaspadaan yang tinggi, dan upaya untuk selalu mengedepankan pencapaian tujuan negara. Dengan kata lain, dalam setiap *move*/pergerakan (kebijakan, kesepakatan, keputusan, kerjasama) yang dilakukan oleh Indonesia dengan negara lain selayaknya mampu memberikan dampak positif terhadap kemajuan bangsa (baik dari segi ekonomi, politik, sosial budaya, maupun pertahanan dan keamanan). Indonesia harus lebih cekatan dalam mengambil peluang-peluang baik yang dapat memberikan *power leverage* (peningkatan kuasa) terhadap bangsa di kancah internasional. Sejauh ini posisi Indonesia dalam diplomasi pertahanan di regional ASEAN nampaknya sudah mencerminkan upaya tersebut. Indonesia dipandang sebagai *pioneer* dalam berbagi gagasan-gagasan terhadap dengan upaya pertahanan dan keamanan kawasan regional ASEAN. Terbukti dari berbagai gagasan program seperti *Trilateral Patrol* di Laut Sulu, Patroli Terkoordinasi di Selat Malaka, dan yang terbaru adalah gagasan mengenai *Operation on Humanitarian Assistance and Disaster Relief* di wilayah *Dispute Area* Laut Cina Selatan. Gagasan-gagasan di atas merupakan salah satu bentuk yang menunjukkan diplomasi pertahanan Indonesia di wilayah ASEAN itu cukup mumpuni.